

P-ISBN : 978-623-7651-32-1

e-ISBN : 978-623-7651-33-8

PENYULUHAN PERIKANAN

Dr. Wahyono Hadi Purnomo, M.Fr, M.Ed
Dra. Ani Leilani, M.Si
Nia Nurfitriana, S. Pi, M.Si

PENYULUHAN PERIKANAN

Penulis:

Dr.H. Wahyono Hadi Parmono M.Fr M.Ed

Dra. Ani Leilani M.Si.

Nia Nurfitriana, S.Pi, M.Si

AMaFRaD  PRESS

2018

PENYULUHAN PERIKANAN

Penulis:

Dr.H. Wahyono Hadi Parmono M.Fr M.Ed

Dra. Ani Leilani M.Si.

Nia Nurfitriana, S.Pi, M.Si

Perancang Sampul :

Alvi Nur Yudistira, S.Pi

Jumlah halaman :

iv + 67 halaman

Edisi/Cetakan :

Cetakan pertama, 2018

Diterbitkan oleh :

AMAFRAD Press

Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Gedung Mina Bahari III, Lantai 6, Jl. Medan Merdeka Timur, Jakarta

Pusat 10110

Telp. (021) 3513300 Fax: 3513287

Email : amafradpress@gmail.com

Nomor IKAPI: 501/DKI/2014

P-ISBN : 978-623-7651-31-1

e-ISBN : 978-623-7651-33-8 (PDF)

© 2018, Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang.

Diperbolehkan mengutip sebagian atau seluruh isi buku dengan mencantumkan sumber referensi

Dilarang memproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

© Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang No. 28 Tahun 2014
All Rights Reserved

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I. SEJARAH PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN PERIKANAN	1
A. Masa Sebelum Kemerdekaan	1
B. Periode Setelah Kemerdekaan	1
BAB II. FALSAFAH DAN PENGERTIAN PENYULUHAN PERIKANAN	7
A.Falsafah Penyuluhan Perikanan.....	8
B.Pengertian Penyuluhan.....	17
BAB III. TUJUAN DAN PRINSIP-PRINSIP PENYULUHAN	22
A.Tujuan Penyuluhan	22
B.Prinsip – Prinsip Penyuluhan	28
BAB IV. ASAS DAN PENDEKATAN PENYULUHAN	34
A.Asas Penyuluhan	34
B.Pendekatan Penyuluhan	36
BAB V. TUGAS DAN PERAN PENYULUH	41
BAB VI. METODE PENYULUHAN	45
BAB VI. PENERIMA MANFAAT DALAM PENYULUHAN PERIKANAN 49	
A.Pengertian	49
B.Ragam Penerima Manfaat Penyuluhan Perikanan	50
C.Karakteristik Penerima Manfaat (Pelaku Utama)	53
D.Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengumpul dan Pengolah Ikan Sebagai Pelaku Utama Dalam Menerima Manfaat	54
BAB VII. KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERIKANAN	59
SEPENGGAL GURATAN PENUTUP	61
DAFTAR PUSTAKA	63
PROFIL PENULIS PERTAMA	65
PROFIL PENULIS KEDUA	66
PROFIL PENULIS KETIGA	67

DAFTAR GAMBAR

Taksonomi Bloom dalam Istilah Lama dan Baru	23
---	----

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas terbitnya buku bertajuk “Penyuluhan Perikanan” ini. Buku ini hadir sebagai pemberi informasi bagi para pembaca mengenai dunia penyuluhan perikanan sekaligus sebagai inspirasi bagi para Penyuluh Perikanan serta seluruh stakeholder penyuluhan dalam menyukseskan pembangunan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan. Saya memberi apresiasi yang tinggi bagi seluruh pihak yang telah membantu dalam penerbitan buku ini.

Penyuluhan perikanan adalah pendidikan non formal yang ditujukan kepada masyarakat perikanan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam bidang kelautan dan perikanan. Secara umum penyuluhan perikanan memiliki peran strategis dalam transformasi perilaku pelaku utama dan pelaku usaha dalam pengembangan usaha kelautan dan perikanan yang lebih baik.

Besar harapan saya, buku ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, Desember 2018

Ketua Sekolah Tinggi Perikanan,

Drs. Moch. Heri Edy, MS

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

Prof. Dr. Ketut Sugama, M.Sc, A.Pu, Prof. Dr. Ir. Sonny Koeshendrajana, Prof. Dr. Ir. Ngurah N. Wiadnyana, DEA., Dr. Singgih Wibowo, M.S, Dr. Ing Widodo S. Pranowo, M.Si., dan Dr. Ir. I Nyoman Suyasa, M.S, yang telah mengkoreksi dan memberikan masukan kepada penulis sehingga buku ini menjadi lebih sempurna dan penyajian materi buku yg lebih baik.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Kepala Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D, FRINA, Sekretaris Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan Dr. Maman Hermawan, M.Sc, Kepala Pusat Pendidikan KP Dr. Bambang Suprakto, A.Pi, S.Pi, MT, Ketua Sekolah Tinggi Perikanan Ir. Mochammad Hery Edi, MS, dan Ketua Sekolah Tinggi Perikanan Jurusan Penyuluhan Perikanan Bogor Yenni Nuraini, S.Pi, M.Sc dengan segenap bimbingan bagi penulis sehingga buku ini dapat diterbitkan.

BAB I. SEJARAH PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN PERIKANAN

Penyuluhan perikanan yang dilakukan sangat identik dengan keberadaan kelembagaan perikanan dimulai dari periode sebelum kemerdekaan tahun 1904 hingga setelah kemerdekaan, terutama pada tahun 1999 di era presiden Abdurrahman Wahid atau yang biasa disapa Gusdur. Eksistensi bidang perikanan pada era tersebut mulai diakui dengan terbentuknya Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) kemudian di tahun 2000 berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan kemudian. Tahun 2009 nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga sekarang.

Berdasarkan sejarah perkembangan kelembagaan bahwa perikanan sebelumnya berada dalam dan dibawah Departemen Pertanian.

A. Masa Sebelum Kemerdekaan.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 23 September 1904 No. 20 Staatsblad 982 yang didasarkan pada Surat Keputusan Raja Belanda No. 28 tanggal 28 Juli 1904 (Staatsblad No. 380) pada tahun 1904 pemerintah kolonial Belanda membentuk sejumlah departemen. Salah satunya adalah Departemen Pertanian. Pada saat itu juga dibentuk dinas, seperti dinas Pertanian, Perikanan, dan Kerajinan. Dinas Perikanan membidangi perikanan laut dan perikanan darat. Pada masa itu pemerintah kolonial Belanda belum mengangkat tenaga Indonesia. Tahun 1930-1942 menjelang perang Dunia II, mulai diangkat beberapa orang Indonesia sebagai pegawai perikanan laut pemerintahan, walaupun jumlahnya sedikit.

B. Periode Setelah Kemerdekaan.

Setelah Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Pemerintah Indonesia membentuk Kabinet pada tanggal 2 September 1945 dan pada Kabinet tersebut terdapat Kementerian Kemakmuran yang membawahi Jawatan Perikanan Laut/Darat (Tingkat Pusat) melalui Koordinator Pertanian. Berdasarkan Keputusan Presiden No.

16 Tahun 1950, Kementerian Kemakmuran dipecah menjadi Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Urusan Perikanan ditangani oleh Kementerian Pertanian.

Peraturan Menteri Pertanian No 1/1951, urusan Perikanan ditangani oleh Pusat Jawatan Perikanan laut dan Pusat Jawatan Perikanan Darat. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden No. 108 Th 1957, susunan organisasi Kementerian Pertanian mengalami perubahan. Dengan perubahan tersebut urusan perikanan dipercayakan kepada Direktorat Jenderal Perikanan yang membawahi Jawatan Perikanan Laut, Jawatan Perikanan Darat, Balai Penyelidikan Perikanan Darat, dan Yayasan Perikanan Laut.

Berdasarkan Keputusan Presiden No 94 Tahun 1962 tepatnya tanggal 13 Februari 1962, pemerintah membentuk Kabinet Kerja yang didalamnya terdapat Departemen Pertanian dan Agraria. Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 1 Tahun 1962 terdapat Direktorat Jenderal Perikanan yang membawahi :

1. Pusat Jawatan Perikanan Darat,
2. Pusat Jawatan Perikanan Laut,
3. Lembaga Penelitian Perikanan Darat,
4. Lembaga Penelitian Perikanan Laut,
5. Lembaga Pendidikan Usaha Perikanan, dan
6. Laboratorium perikanan Darat Bogor.

Dalam Kabinet Dwikora yang disempurnakan pada Tahun 1964, terdapat kompartemen Pertanian dan Agraria yang membawahi enam departemen, diantaranya adalah Departemen Perikanan Darat/Laut pada tanggal 7 Juli 1965 terbit Keputusan Presiden yang melimpahkan tugas Perikanan Laut ke Kompartemen Maritim sebagai Departemen Perikanan dan Pengolahan Kekayaan Laut. Sedangkan urusan Perikanan Darat ditangani oleh Departemen Pertanian, Kompartemen Pertanian.

Pada tanggal 25 Juli 1966, sejak terbentuknya Kabinet Ampera, Departemen Perikanan dan Pengolahan Kekayaan laut diubah menjadi Direktorat Jenderal Pengolahan Kekayaan Laut dibawah Departemen

Maritim. Pada Era Orde Baru, berdasarkan Keputusan Presiden No. 184 Tahun 1968, Perikanan Laut dan Perikanan Darat dilebur menjadi Direktorat Jenderal Perikanan dibawah naungan Departemen Pertanian. Seiring dengan itu, di daerah hanya ada Dinas Perikanan Provinsi Daerah Tingkat I.

Pada Tahun 1999, Presiden Republik Indonesia, saat itu yaitu Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden No 335/M Tahun 1999 yang salah satu diantaranya adalah mengangkat Ir Sarwono Kusumoatmodjo sebagai Menteri Eksplorasi Laut. Selanjutnya dibentuk Departemen Eksplorasi Laut (DEL) melalui Keputusan Presiden No. 136 Tahun 1999. Tidak lama terbit Keputusan Presiden No. 145 Tahun 1999 merubah penyebutan dari Menteri Eksplorasi laut menjadi Menteri Eksplorasi laut dan Perikanan dan perubahan ini ditindak lanjuti dengan penggantian nomenklatur Departemen Eksplorasi Laut (DEL) menjadi Departemen Eksplorasi laut dan Perikanan (DELP).

Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) lahir melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999. Dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan Kabinet setelah sidang tahunan MPR Tahun 2000, dan terjadi perubahan nomenklatur Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sesuai Keputusan Presiden RI No. 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Departemen.

Pada Tahun 2009 nomenklatur Departemen dirubah menjadi Kementerian, hal ini berdasarkan Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang “Perubahan Nomenklatur dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)”. Berdasarkan sejarah perkembangan kelembagaan mulai sejak sebelum Kemerdekaan s/d Kemerdekaan NKRI, pada umumnya perikanan merupakan bagian dari pertanian, demikian juga penyelenggaraan penyuluhan perikananpun merupakan bagian dari penyuluhan pertanian.

Seiring dengan perkembangan kelembagaan yang menangani perikanan yaitu sejak Tahun 1999 berada dibawah Departemen Eksplorasi laut dan Perikanan sampai dengan dikeluarkannya Perpres No 47 tahun 2009 yaitu menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal ini berpengaruh terhadap penyelenggaraan penyuluhan perikanan dilaksanakan oleh lembaga yang menangani perikanan dimulai dari Pusat Pendidikan Latihan penyuluhan dibawah Sekretariat jendral DKP s/d tahun 2007 yang selanjutnya ditangani oleh Pusat Penyuluhan yang berada dibawah Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sejarah Penyuluhan Pertanian ini ada sejak zaman Belanda, Jepang, awal kemerdekaan sampai dengan lahirnya Departemen Kelautan dan Perikanan. Dalam rangka mengembangkan penyelenggaraan penyuluhan Perikanan yang efisien, efektif, dan profesional, lahir Kepmen Kelautan dan Perikanan No. Kep.44/Men/2002 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan. Pada waktu itu pengaturan penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga belum dapat memberikan dasar hukum yang kuat dan lengkap bagi penyelenggaraan penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, telah lahir Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang disahkan pada tanggal 15 Nopember 2006 di Jakarta. Indonesia adalah sebagai negara Agraris dan juga Bahari yang memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia dengan keragaman hayati yang sangat tinggi. Pada saat krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1998, bidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mampu memberikan kontribusi yang signifikan pada Produk Domestik Bruto Nasional. Hal tersebut merupakan modal dasar yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian nasional.

Dalam rangka mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang berkembang pada akhir-akhir ini dengan isu globalisasi, desentralisasi,

demokratisasi, dan pembangunan berkelanjutan, diperlukan Sumberdaya Manusia yang handal untuk mewujudkan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang tangguh, produktif, efisien, dan berdaya saing sehingga dapat mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Maka disinilah perlu dan pentingnya penyuluhan.

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama, agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup.

Menurut Patton dan Miller (1993) dalam P3P Unram (2007) menyatakan bahwa penyuluhan menjadi organisasi masa depan yang artinya keberhasilan penyuluhan ditentukan oleh peran kelembagaan penyuluhan. Penyuluhan harus mengalami pergeseran paradigma sehingga peran strategis kegiatan tersebut dapat diwujudkan. Beberapa pergeseran paradigma tersebut adalah :1) Penyuluhan bergeser dari pendekatan top down kepada pendekatan partisipatif 2) Dari parsial kepada holistik dan sistem; 3) Dari “pengajaran dan training” kepada “pembelajaran dan fasilitasi”, dan 4) Dari pendekatan *single* disiplin kepada multidisiplin. Pergeseran paradigma penyuluhan akan semakin mempercepat pencapaian tujuan penyuluhan. Pendekatan penyuluhan yang bersifat pembelajaran top down artinya materi penyuluhan disampaikan hanya bersifat satu arah dari penyuluh kepada sasaran serta pengambilan keputusan berada di tangan penyuluh. Pembelajaran ini bersifat partisipatif oleh peserta belajar atau sasaran dan bukan dominan diambil alih oleh penyuluh atau bersifat instruktif atau direktif.

Menurut Rukminto (2012) Pendekatan direktif atau instruktif dapat disebut sebagai *technical assistance*, sedangkan pendekatan non direktif atau partisipatif disebut sebagai *self help*. Pendekatan partisipatif artinya penyuluh mempercayakan kepada sasaran dalam menganalisis kondisi

atau berbagai masalah yang terjadi dalam komunitas masyarakat dan menemukan metode atau cara atau solusi yang tepat dalam pemecahan masalah demi tujuan perubahan perilaku, sehingga penyuluh hanya mengembangkan dan menggali potensi yang mereka miliki serta melakukan pendampingan setiap tahap yang sasaran lakukan, Pendekatan ini dapat dikatakan dari sasaran, untuk sasaran, dan oleh sasaran sendiri. Pembelajaran dan fasilitasi dalam penyuluhan bersifat menyeluruh atau holistik untuk memenuhi 3 (tiga) aspek perilaku pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui pendekatan berbagai rumpun keilmuan multidisiplin dan tidak hanya satu disiplin ilmu seperti ilmu budidaya perikanan yang mempelajari pembenihan, pendederan, dan pembesaran.

Pendekatan penyuluhan secara direktif atau instruktif dapat dilakukan pada struktur sosial masyarakat yang masih sangat terbelakang. Pendekatan ini hanya dilakukan pada tahap awal saja hingga masyarakat dirasa telah cukup berkembang kemudian dilanjutkan dengan pendekatan secara partisipatif.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan penyuluh dalam menghadapi sasaran sebagai binaanya antara lain menurut Soetomo (2006) adalah penyusunan program dan pengembangan jaringan kerja. Penyusunan program penyuluhan merupakan persiapan awal untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan yang didalamnya terkandung unsur penggambaran terhadap kondisi masyarakat yang ingin diberikan penyuluhan dengan segala problematikanya, pemilihan metode yang tepat, dan pemilihan materi yang tepat serta sistem evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan tersebut; 2) Pengembangan jaringan kerja, penyuluhan bukan pekerjaan yang sederhana dan merupakan hasil kerja penyuluh saja namun semua pihak yang terlibat didalamnya. Selan itu menurut Vardiansyah (2005) strategi penyuluhan juga sangat berpengaruh dalam memilih gaya komunikasi antara penyuluh dengan sasaran. Kegagalan dalam mencapai tujuan bersama karena tidak ada satu persepsi atau kesepahaman dalam mengambil keputusan bersama karena pemilihan gaya komunikasi yang kurang tepat.

BAB II. FALSAFAH DAN PENGERTIAN PENYULUHAN PERIKANAN

Falsafah berasal dari kata Yunani *Philosophia*, *Philare* : cinta dan *sophia* : kebijakan, jadi *philosophia* berarti cinta akan kebijakan. Sedangkan kebijakan memiliki pengertian yang mendalam yang mengupas seluruh kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Selain itu, kebijakan dapat berarti sikap hidup yang benar.

Para ahli mendefinisikan kata falsafah dengan berbagai pengertian sebagai berikut :

1. Menurut Butt (1961) mengartikan falsafah sebagai suatu pandangan hidup.
2. Dahama dan Bhatnagar (1980) mengartikan falsafah sebagai landasan pemikiran yang bersumber kepada kebijakan moral tentang segala sesuatu yang akan dan harus diterapkan di dalam praktek.
3. Kelsey dan Hearne (1955) menyatakan bahwa falsafah penyuluhan harus berpijak kepada pentingnya pengembangan individu di dalam perjalanan pertumbuhan masyarakat dan bangsanya. Karena itu ia mengemukakan bahwa falsafah penyuluhan adalah : bekerja bersama masyarakat untuk membantunya agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia.

Di Amerika Serikat juga telah lama dikembangkan falsafah 3-T yaitu: *teach*, *truth* dan *trust* (pendidikan, kebenaran dan kepercayaan/keyakinan). Yang artinya penyuluhan merupakan kegiatan pendidikan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang telah diyakini. Dengan kata lain, dalam penyuluhan perikanan, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dididik untuk menerapkan setiap informasi (baru) yang telah diuji kebenarannya dan telah diyakini akan dapat memberikan manfaat (ekonomi maupun non ekonomi) bagi kesejahteraannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Ensminger (1962) menyatakan bahwa falsafah penyuluhan dapat dirumuskan :

1. Penyuluhan adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk mengubah pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat.

2. Sasaran penyuluhan adalah segenap masyarakat (pria, wanita, termasuk anak-anak) untuk menjawab kebutuhan dan keinginannya. Penyuluhan juga mengajar masyarakat tentang apa yang diinginkan, dan bagaimana cara mencapai keinginan itu.
3. Penyuluhan bertujuan untuk membantu masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri.
4. Penyuluhan adalah belajar sambil bekerja dan percaya tentang apa yang dilihatnya.
5. Penyuluhan adalah pengembangan individu, pemimpin mereka dan pengembangan dunianya secara keseluruhan.
6. Penyuluhan suatu bentuk kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.
7. Penyuluhan adalah pekerjaan yang diselaraskan dengan budaya masyarakatnya.
8. Penyuluhan adalah hidup dengan saling berhubungan saling menghormati, dan saling mem-percayai antara satu dengan yang lainnya.
9. Penyuluhan merupakan kegiatan dua arah.
10. Penyuluhan merupakan proses pendidikan yang berkelanjutan.

A. Falsafah Penyuluhan Perikanan

Falsafah penyuluhan perikanan dapat diinterpretasikan menjadi 6 (enam) falsafah mulai dari falsafah perikanan sebagai ilmu hingga falsafah perikanan membakar sampah. Semua falsafah penyuluhan perikanan tersebut sangat berkaitan erat dengan penyuluhan sebagai kegiatan pendidikan non formal dalam penyampaian pesan yang melibatkan hubungan antara penyuluh dan sasaran penyuluhan.

a. Falsafah penyuluhan perikanan sebagai ilmu

Hakekat manusia, anak manusia dilahirkan dalam keadaan belum siap melaksanakan hidupnya. Karena belum siap maka anak manusia harus mempersiapkan diri dan mendapatkan perlakuan khusus. Suatu

kenyataan bahwa anak manusia memerlukan waktu yang jauh lebih lama apabila dibandingkan dengan hewan, untuk mempersiapkan hidupnya. Manusia mempunyai kesempatan yang jauh lebih lama dibandingkan dengan hewan untuk berlatih dan belajar melaksanakan kehidupan.

Seorang anak manusia dilahirkan dalam keadaan belum dapat menolong dirinya sendiri. Sejak saat dilahirkan dan masih lama setelah itu dalam hidupnya, manusia masih memerlukan bantuan dan bantuan tersebut harus datang dari pihak lain. Tanpa bantuan dari pihak lain, manusia tidak mungkin dapat melangsungkan hidupnya. Bantuan tersebut bukan hanya untuk kebutuhan fisik akan tetapi juga kebutuhan psikologis, sosial, dan normatif.

Kebutuhan fisik berupa makanan minuman, pakaian dan tempat tinggal, sedangkan kebutuhan psikologis berupa rasa aman dan cinta kasih. Kebutuhan sosial antara lain berupa komunikasi dan interaksi antara sesama manusia. Kebutuhan normatif berupa hukum dan peraturan yang menjamin ketertiban dalam hidup bermasyarakat. Dalam rangka memenuhi semua kebutuhan tersebut, manusia tidak dapat melakukan sendiri namun memerlukan bantuan orang lain.

Menurut Langeveld (1966), fenomena perlu bantuan orang lain pada masa anak ini dampaknya sangat besar bagi perkembangan manusia. Selanjutnya Langeveld berpendapat bahwa anak manusia dilahirkan dalam lingkungan manusiawi yang bercirikan tanggung jawab, penuh perasaan, komunikatif, dan sosial religius. Keadaan perlu bantuan bagi anak manusia itu tidak merupakan beban bagi orang tua, melainkan justru dirasakan sebagai suatu karunia. Perlu bantuan bagi si anak mengukuhkan kedudukan orang tua dan kesediaan serta ketulusan mereka untuk mendidik maupun merawat anak manusia mempersiapkan diri menyongsong hari depannya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka keadaan perlu bantuan itu merupakan salah satu azas perkembangan manusia, Soelaeman, (1988). Keadaan manusia saat dilahirkan memerlukan bantuan dibandingkan dengan tugas yang harus diembannya saat ia telah dewasa. Di antara dua

hal tersebut terdapat kesenjangan yang luas dan dalam. Menjembatani kesenjangan tersebut memerlukan upaya yang luas dan dalam pula. Upaya yang dilakukan untuk manusia agar dapat melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri adalah melalui pendidikan.

Manusia adalah makhluk yang perlu pendidikan dan dapat dididik, hal ini dapat dijelaskan dari sudut pandang empat prinsip dasar antropologis pendidikan, yaitu prinsip sosialitas, prinsip individualitas, prinsip identitas moral dan prinsip unisitas.

Empat prinsip dasar antropologis pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Prinsip sosialitas dapat diartikan bahwa manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial. Dalam melangsungkan kehidupannya secara fundamental manusia perlu bergaul dengan sesamanya. Dalam interaksi itu ia dapat memberi dan menerima pengaruh dari orang lain yang ikut terlibat didalamnya.
2. Prinsip individualitas menjelaskan bahwa setiap individu memiliki eksistensinya sendiri. Walaupun dalam kehidupan kesehariannya setiap individu selalu berinteraksi dengan individu lainnya dalam masyarakat, namun mereka masing-masing tetap memiliki ciri-ciri individual yang berbeda satu dengan lainnya.
3. Prinsip identitas moral dapat diartikan bahwa pada dasarnya semua manusia sama dalam hal kemampuan mengenai perbuatan yang baik atau yang buruk menurut nilai moral yang dianut oleh masyarakatnya serta mampu pula menyelaraskan tingkah lakunya dengan tuntutan moral tersebut. Bila prinsip moral ini dipadukan dengan prinsip sosialitas yang menempatkan individu di tengah pergaulan masyarakatnya, kemudian dipadukan pula dengan prinsip individualitas yang mencakup kemampuan individu untuk tampil dengan ciri-ciri kepribadiannya, maka akan tampil individu-individu yang mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukannya.

4. Prinsip unisitas mengatakan bahwa setiap individu bersifat unik dan tiada satupun individu yang benar-benar identik dengan individu lainnya.

Keempat prinsip dasar Antropologi Pendidikan ini menjadi landasan yang kuat untuk membuktikan bahwa manusia adalah makhluk yang dapat dididik. Pendidikan pada dasarnya adalah bentuk pergaulan hidup (prinsip sosialitas) antara orang dewasa dan anak-anak, agar yang terakhir ini kelak dapat menjalani kehidupannya secara mandiri dan penuh tanggung jawab. Kelahiran manusia belum terspesialisasi. lain sekali halnya dengan hewan yang sejak lahir, ia sudah mampu melakukan sesuatu seperti yang dilakukan induknya walaupun ia hi-dup di tengah hewan jenis lainnya.

Seekor anak itik yang lahir ditengah-tengah induk-induk ayam tetap langsung dapat berenang. Berbeda dengan manusia yang baru dilahirkan belum menjamin bahwa ia akan dapat hidup sebagai manusia. Untuk memungkinkan seorang bayi kelak dapat hidup sebagai manusia dan melaksanakan tugas hidup kemanusiaan, ia perlu dididik dan dibesarkan oleh manusia dalam lingkungan kemanusiaan. Dengan perkataan lain ia harus "*dimanusiakan*". Sehubungan dengan itu pendidikan ada kalanya disebut sebagai "*pemanusiaan manusia*".

Peristiwa "manusia serigala" membuktikan bahwa manusia adalah makhluk yang perlu dididik. Beberapa puluh tahun yang lalu di India, seorang pemburu menemukan dua anak manusia di tengah hutan belantara, masing-masing berusia enam dan delapan tahun. Ketika kedua anak tersebut melihat pemburu, mereka lari ketakutan di atas kedua kaki dan kedua tangannya sambil meraung-raung. Mereka berlari cepat memasuki sebuah goa dan kemudian diberi perlindungan oleh seekor serigala. Setelah bekerja keras, pemburu tadi berhasil me-nangkap kedua orang anak manusia itu kemudian dibawa ke kota.

Mereka berdua menjadi object studi para ahli. Setelah melewati berbagai kesulitan akhirnya kedua anak itu dapat dididik kembali menjadi manusia normal. Kasus "Manusia Serigala" seperti tersebut di atas membuktikan bahwa kesadaran manusia akan tugas hidupnya sebagai

manusia serta kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan ternyata tidak dibawa sejak lahir. Demikian pula pengetahuan mereka akan norma dan nilai sosial tidak dengan sendirinya mendorong mereka untuk bertingkah laku sesuai norma dan nilai tersebut dan dengan penuh kesadaran yang datang dari dalam dirinya untuk melaksanakannya.

Kesemuanya harus melalui proses pembiasaan dan internalisasi dalam lingkungan keluarga. Jadi agar nilai dan norma sosial dapat dengan penuh kesadaran dipatuhi dan dilaksanakan dalam interaksi sosial oleh individu, kedua hal tersebut tidak cukup hanya dikuasai oleh kawasan (domain) kognitif dan psikomotor akan tetapi harus pula mampu dihayati dalam kawasan afektif. Hal ini membawa konsekuensi bahwa untuk membentuk individu bertingkah laku susila tidak cukup dengan hanya diberi pengajaran dan latihan, tetapi yang terpenting mereka harus dididik.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian mengenai falsafah seperti tersebut diatas adalah bahwa manusia sebagai makhluk perlu dididik karena

1. Manusia dilahirkan bukan dalam keadaan dewasa. Mereka belum dapat bertindak secara mandiri dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas hidupnya.
2. Kemampuan manusia untuk hidup sebagai makhluk sosial yang secara mandiri dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas hidupnya, tidak diperoleh mereka melalui instink dan pertumbuhan serta perkembangan dari dalam. Maka manusia perlu dididik.
3. Agar manusia dapat hidup dalam kehidupan yang bermartabat selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, mereka tidak cukup hidup hanya dengan mengandalkan dorongan-dorongan nafsu dan instink belaka. Oleh karena itu pendidikan diperlukan guna "*memanusiakan manusia*".

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai proses pendidikan di Indonesia juga dikenal adanya falsafah pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro sebagai berikut :

1. Ing Ngarso Sung Tulodo, mampu memberikan contoh atau tauladan bagi masyarakat sasaran.

2. Ing Madyo Mangun Karso, mampu menumbuhkan inisiatif dan mendorong kreatifitas, serta semangat dan motivasi untuk selalu belajar dan mencoba.
3. Tut Wuri Handayani, mau menghargai dan mengikuti keinginan-keinginan serta upaya yang dilakukan masyarakatnya, sepanjang tidak menyimpang/meninggalkan acuan yang ada, demi tercapainya tujuan perbaikan kesejahteraan hidup.

Karena penyuluhan adalah suatu sistem pendidikan, maka perlu diketahui beberapa aliran filsafat pendidikan :

1. Idealisme.

Kenyataan itu ada dalam pikiran (gantungkan cita-citamu, masyarakat yang adil makmur), pengaruhnya aliran ini bagi pendidikan adalah bahwa realitas itu ada dalam pikiran sehingga tujuan pendidikan adalah untuk melatih pikiran.

2. Pragmatisme.

Kenyataan ada dalam pengalaman, bagi aliran pragmatis kebenaran itu dapat berubah-ubah dan sifatnya nisbi atau relative. Apa yang benar sekarang mungkin tidak benar lagi esok harinya. Hal ini tergantung sekali dari pengalaman, erat hubungannya dengan peni-laian dan kebutuhan manusia. Pengaruh aliran pragmatis ini terhadap pendidikan besar sekali, terutama karena pengaruh John Dewey dan pengikut-pengikutnya, mereka menempatkan pendidikan sebagai lembaga utama dalam kehidupan. Bila kebenaran itu adalah hasil pengalaman, maka kita harus belajar sambil berbuat (*learning by doing*).

3. Realisme

Kenyataan itu terpisah dari orangnya, tetapi ada dalam alam. Hukum adalah hukum kenyataan. Maka untuk kenyataan itu kita harus menyesuaikan diri kepada alam dan lingkungan kita. Harus ilmiah dan objektif, harus bebas dari objektifitas, takhayul dan prasangka. Harus mempedulikan fakta-fakta saja, bekerja sesuai dengan keadaan alam untuk mendapatkan kenyataan tadi (*seing is believing*).

b. Falsafah penyuluhan perikanan untuk membantu dirinya sendiri

Falsafah penyuluhan perikanan untuk membantu dirinya sendiri masih ada keterkaitan dengan falsafah penyuluhan perikanan sebagai ilmu. Falsafah ini bergerak berdasarkan tujuan penyuluhan itu sendiri untuk mengubah perilaku sasaran, sehingga sasaran penyuluhan baik pembudidaya, nelayan, dan pelaku usaha perikanan dapat menolong dirinya sendiri atau mandiri untuk mengubah nasibnya sendiri. Penyuluh sebagai agen perubahan dalam membawa sebuah inovasi untuk dikomunikasikan kepada sasaran penyuluhan harus melewati tahapan perubahan berencana, yang pada akhirnya penyuluh harus dapat melepas ketergantungan sasaran penyuluhan supaya mereka dapat mengubah nasibnya sendiri dalam artian dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mau menjadi mau, dan dari tidak mampu menjadi mampu, setelah itu penyuluh dapat membaaur dengan sasaran melalui interaksi sosial yang berkelanjutan dan menerapkan inovasi ke dalam suatu komunitas sasaran penyuluhan. Sasaran penyuluhan diharapkan dapat mandiri untuk dapat mengubah perilaku mereka sendiri sehingga pada umumnya dapat meningkatkan pendapatan mereka yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan.

c. Falsafah penyuluhan perikanan demokrasi

Falsafah penyuluhan perikanan demokrasi yang artinya bahwa inovasi yang dibawa oleh penyuluh melalui komunikasi dua arah merupakan inovasi yang menjadi kebutuhan dari sasaran penyuluhan, penerapan inovasi tersebut dilakukan oleh sasaran penyuluhan tidak terlepas dari pendampingan oleh penyuluh, dan hasil inovasi akan dinikmati oleh sasaran penyuluhan itu sendiri. Penyuluhan harus dilaksanakan dengan melibatkan sasaran karena hal tersebut akan sangat mempengaruhi keberhasilan penyuluhan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Penyuluhan perikanan bukan bersifat otoriter yang artinya bahwa penyuluh pemegang kekuasaan atau yang paling memegang peranan penting dalam proses difusi inovasi yang artinya dalam proses penyebaran sebuah inovasi melalui komunikasi dari waktu ke waktu antar anggota dalam suatu sistem sosial, karena proses tersebut melibatkan penyuluh dan sasaran penyuluhan sehingga sebuah inovasi dapat diadopsi. Inovasi dapat berupa objek, pengetahuan, cara, teknologi, dan penemuan baru.

d. Falsafah penyuluhan kontinu

Penyuluhan bersifat kontinu atau berkelanjutan (*sustainability*) yang dilakukan secara terus menerus dalam periode waktu yang lama sampai tujuan penyuluhan untuk mengubah perilaku sasaran dapat tercapai. Proses penyuluhan bukan proses yang terputus. Penyuluh harus melakukan pendampingan sampai sebuah inovasi tersebut dapat diterapkan. Apabila sebuah inovasi telah berhasil diterapkan, penyuluh harus meninggalkan sasaran dalam sebuah sistem sosial supaya dapat mandiri dan tidak memiliki ketergantungan dengan penyuluh.

Terdapat beberapa kasus dalam program penyuluhan yang dilakukan dengan menggunakan anggaran pemerintah berhenti apabila masa periode program tersebut selesai karena anggaran yang terbatas tanpa adanya proses pendampingan lebih lanjut dan hanya berlandaskan proyeksi saja. Hal ini sangat bertentangan dengan falsafah penyuluhan bersifat kontinu, pendampingan secara berkelanjutan harus dilakukan sehingga sasaran dapat mengadopsi inovasi yang telah didifusikan oleh penyuluh. Pada dasarnya, sasaran melalui 5 (lima) tahapan dalam proses pengambilan keputusan terhadap sebuah inovasi yaitu pengetahuan yang artinya sasaran memperoleh informasi melalui media komunikasi ataupun komunikasi interpersonal terhadap sebuah inovasi, persuasi merupakan tahap pertimbangan sasaran, keputusan merupakan tahapan menerima atau menolak sebuah inovasi, implementasi yang artinya sasaran mulai menerapkan inovasi, dan konfirmasi yang merupakan tahapan mengkonfirmasi kembali (pembenaran) terhadap sebuah inovasi. Penyuluhan

perikanan harus melalui 5 (lima) tahapan tersebut sehingga membutuhkan proses yang kontinu dengan jangka waktu yang lama karena penerapan inovasi bukan sesuatu yang mudah dengan tujuan perubahan perilaku sasaran.

e. Falsafah penyuluhan perikanan kerjasama

Tujuan penyuluhan dapat tercapai karena proses kerjasama antara penyuluh dan sasaran, kedua belah pihak memiliki andil yang sama. Kerjasama yang artinya penyuluh bertindak sebagai agen perubahan atau sebagai “tamun” yang membawa sebuah inovasi untuk diadopsi sehingga tujuan perubahan perilaku dalam sistem sosial sasaran tercapai. Sedangkan, sasaran sebagai penerima inovasi yang akan menerapkan inovasi tersebut dan tidak terlepas dari proses pendampingan oleh agen perubahan hingga sasaran dapat mandiri.

Tanpa adanya kerjasama tujuan penyuluhan mustahil untuk tercapai, penyuluh dan sasaran harus saling berempati satu sama lain. Penyuluh harus memahami struktur sosial sasaran termasuk latar belakang pendidikan, agama, bahasa, budaya, dan tingkat ekonomi sehingga dapat dengan mudah menjadi bagian dari sasaran dalam sebuah komunitas tertentu. Sedangkan, sasaran juga harus dapat memahami secara bertahap terhadap inovasi yang didifusikan oleh agen perubahan atau penyuluh.

f. Falsafah Membakar Sampah

Falsafah penyuluhan sangat erat kaitannya dengan falsafah “membakar sampah”. Falsafah “membakar sampah” ini dianalogikan bahwa sampah dalam keadaan basah semua kemudian disiram dengan minyak tanah sedikit demi sedikit dan jangan langsung dengan bensin, kadang-kadang perlu disiram beberapa kali dengan minyak tanah sehingga sampah kering dan terbakar kemudian mempengaruhi terbakarnya sampah yang lain.

Falsafah ini mengandung arti bahwa agen perubahan atau penyuluh dalam melakukan kegiatan TOT atau *Transfer of Technology* atau yang dapat disebut sebagai transfer inovasi kepada sasaran dalam sebuah komunitas tertentu tidak dapat dilakukan secara langsung namun harus bertahap, berulang, dan berkelanjutan hingga perubahan perilaku dapat terjadi. Individu sebagai anggota dalam komunitas yang telah berubah perilakunya dapat mempengaruhi individu lainnya hingga seluruh anggota kelompok mengalami perubahan perilaku dengan menerapkan inovasi yang dikomunikasikan oleh penyuluh.

B. Pengertian Penyuluhan

Istilah *university extension* atau *extension of the university* dipergunakan di Inggris pada tahun 1940-an. Sekitar tahun 1867-1868 James Stuart dari Trinity College (Cambridge) untuk pertama kalinya memberikan ceramah kepada perkumpulan kaum wanita dan perkumpulan kaum pekerja di Inggris Utara. Stuart kemudian dianggap sebagai bapak penyuluhan. Pada tahun 1871, Stuart mengusulkan pada Universitas Cambridge agar penyuluhan dijadikan mata kuliah. Kemudian pada tahun 1873 Cambridge secara resmi menerapkan system penyuluhan yang diikuti oleh Universitas London (1876) dan Universitas Oxford (1878).

Menjelang tahun 1880 kegiatan ini telah merupakan gerakan penyuluhan tempat perguruan tinggi memperlebar sayapnya ke luar kampus. Sejak awal abad 20 istilah penyuluhan mulai digunakan secara umum di Amerika Serikat untuk menunjukkan bahwa sasaran pengajaran di Universitas tidak hanya terbatas di lingkungan kampus tetapi diperluas hingga semua pihak yang hidup di lingkungan manapun. Penyuluhan dapat dipandang sebagai suatu bentuk pendidikan untuk orang dewasa yang menempatkan pengajar sebagai staf universitas.

Bertahun-tahun hal ini menjadi kegiatan utama akademi pertanian yang memperkerjakan penyuluh pertanian daerah di setiap negara bagian. Adapun istilah penyuluhan di beberapa negara.

1. *Voorlichting* (Belanda) yang berarti memberi penerangan untuk menolong seseorang menemukan jalannya.
2. *Advisory work* dan beratung (Inggris dan Jerman) yang berarti seorang pakar dapat memberikan petunjuk kepada seseorang tetapi seseorang tersebut yang berhak menentukan pilihannya.
3. *Erziehung* (Amerika Serikat) yang menekankan tujuan penyuluhan pertanian untuk mengajar seseorang sehingga dapat memecahkan masalah sendiri.
4. *Forderung* (Austria) yang berarti menggiring seseorang kearah yang diinginkan.
5. *Vulgarization* (Perancis) yang menekankan pentingnya pesan bagi orang awan.
6. *Capasitacion* (Spanyol) menunjukkan adanya keinginan untuk meningkatkan kemampuan manusia yang diartikan dengan training (latihan).

Terdapat berbagai definisi penyuluhan oleh beberapa ahli diantaranya adalah :

1. Penyuluhan menurut Van Den Ban

Penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa memberi keputusan yang benar.

Secara sistematis pengertian penyuluhan (sektor perikanan dan kelautan) adalah suatu proses yang :

- a. Membantu nelayan, pembudi daya ikan, pengolah dan pedagang ikan menganalisis situasi yang sedang dihadapi dan melakukan perkiraan kedepan.
- b. Membantu nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang ikan menyadarkan terhadap kemungkinan timbulnya masalah dari analisis tersebut.
- c. Meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan wawasan terhadap suatu masalah, serta mampu menyusun kerangka berdasarkan

pengetahuan yang dimiliki nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang ikan.

- d. Membantu nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang ikan memperoleh pengetahuan yang khusus berkaitan dengan cara pemecahan masalah yang dihadapi serta akibat yang ditimbulkannya sehingga mereka mempunyai berbagai alternative tindakan.
- e. Membantu nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang ikan memutuskan pilihan yang tepat yang menurut pendapat mereka sudah optimal.
- f. Meningkatkan motivasi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang ikan untuk dapat menerapkan pilihannya.
- g. Membantu nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang ikan mengevaluasi dan meningkatkan keterampilan mereka dalam membentuk pendapat dan mengambil keputusan.

2. Penyuluhan menurut Padmowihajo

Sistem pendidikan orang dewasa (andragogi), bukan transfer teknologi. Dalam pengertian ini terdapat falsafah untuk saling asah, saling asih dan saling asuh dalam suatu interaksi (komunikasi) yang multi arah. Penyuluh hanya sebagai fasilitator dan motivator yang mampu memotivasi sasaran untuk mandiri dan swadaya.

3. Penyuluhan menurut Totok Mardikanto

- a. Penyuluhan sebagai Proses Penyebarluasan Informasi

Istilah penyuluhan pada dasarnya diturunkan dari kata extension yang dapat diartikan sebagai perluasan atau penyebarluasan. Penyuluhan perikanan dapat diartikan sebagai proses penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan upaya perbaikan cara cara penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan pengolahan ikan demi tercapainya peningkatan produktivitas, pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan dan perbaikan kesejahteraan keluarga/masyarakat yang diupayakan melalui kegiatan pembangunan perikanan.

b. Penyuluhan sebagai proses penerangan

Istilah penyuluhan berasal dari kata dasar suluh yang berarti pemberi terang ditengah kegelapan. Dengan demikian penyuluhan perikanan dapat diartikan sebagai proses untuk memberikan penerangan kepada masyarakat (nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan) tentang segala sesuatu yang belum diketahui (dengan jelas) untuk dilaksanakan/diterapkan dalam rangka peningkatan produksi dan pendapatan/keuntungan yang ingin dicapai melalui proses pembangunan perikanan.

c. Penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku

Penyuluhan perikanan dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku (pengetahuan, sikap dan keterampilan) di kalangan masyarakat (nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan) agar mereka tahu, mau dan mampu melaksanakan perubahan-perubahan dalam usaha perikananannya demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan/keuntungan dan perbaikan kesejahteraan keluarga/masyarakat yang ingin dicapai melalui pembangunan perikanan.

d. Penyuluhan sebagai proses pendidikan

Penyuluhan perikanan dapat diartikan sebagai suatu system pendidikan bagi masyarakat (nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan) untuk membuat mereka tahu, mau dan mampu berswadaya melaksanakan upaya peningkatan produksi, pendapatan/keuntungan dan perbaikan kesejahteraan keluarga/masyarakatnya.

e. Penyuluhan sebagai proses rekayasa sosial

Penyuluhan perikanan dapat diartikan sebagai proses rekayasa sosial untuk terciptanya perubahan perilaku dari anggota-anggotanya, seperti yang dikehendaki demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan/keuntungan dan perbaikan kesejahteraan keluarga nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan serta masyarakatnya.

4. Teko Soemodiwiryo

Usaha-usaha untuk memajukan ekonomi dan keadaan sosial rakyat, maka selalu harus diperhatikan bahwa kegiatan penyuluhan adalah kegiatan pendidikan.

5. Penyuluhan (Undang-undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) No.16 tahun 2006)

- a. Sistem penyuluhan perikanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
- b. Penyuluhan perikanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- c. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
- d. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
- e. Pelaku utama kegiatan perikanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.

6. Penyuluhan menurut Maunder

Menurut Maunder (1972) *extension is the extending of, or a service or system which extends, the educational advantages of an institution to persons unable to avail themselves of them in a normal manner.* Pengertian definisi penyuluhan menurut Maunder menitikberatkan pada manfaat dari pendidikan pada sebuah organisasi atau institusi untuk memberdayakan seseorang supaya dapat bermanfaat untuk diri mereka sendiri. Pendidikan dalam hal ini merupakan pendidikan non formal yang direncanakan dan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran penyuluhan yang bersangkutan.

BAB III. TUJUAN DAN PRINSIP-PRINSIP PENYULUHAN.

A. Tujuan Penyuluhan

Penyuluhan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu pasti memiliki tujuan baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang, walaupun keduanya tidak terlepas dari tujuan untuk mengubah perilaku sasaran. Adapun tujuan penyuluhan tersebut sebagai berikut:

a. Tujuan Jangka Pendek :

Dapat merubah perilaku sasaran (pengetahuan, sikap dan keterampilannya) dengan meningkatkan produksi dan meningkatkan pendapatannya.

b. Tujuan Jangka Panjang :

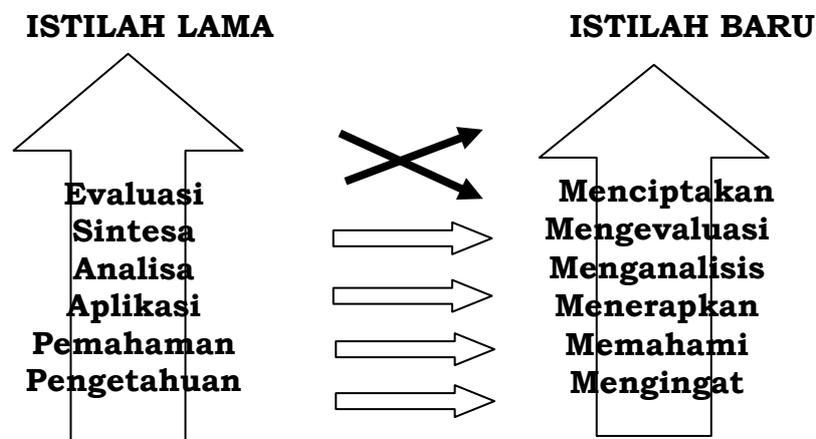
Dapat merubah perilaku sasaran (pengetahuan, sikap dan keterampilannya) menjadi perilaku baru yang lebih baik (*better fishing, aquaculturing, processing and marketing, better bussiness, better living, better environmental, and better society*) menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

B. Aspek Perubahan Perilaku

Perubahan perilaku merupakan tujuan akhir penyuluhan yang tidak terlepas dari 3 (tiga) aspek yaitu kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) dan psikomotorik (keterampilan). Apabila perubahan dalam tiga aspek tersebut telah terjadi pada sasaran penyuluhan, maka tujuan penyuluhan tersebut tercapai. Penyuluh sebagai agen perubahan harus dapat menggunakan strategi komunikasi sehingga keberhasilan komunikasi dapat tercapai. Keberhasilan komunikasi dapat tercapai harus memperhatikan 5 (lima) indikator yaitu media yang tepat, kondisi lingkungan yang kondusif, tujuan yang diinginkan, materi atau isi, dan metode yang digunakan,

a. Kognitif (Pengetahuan)

Menurut Pohl (2000) dalam buku *Learning to Think, Thinking to Learn* bahwa terdapat perbedaan istilah lama dan baru dalam taksonomi Bloom.



Gambar 1. Taksonomi Bloom dalam Istilah Lama dan Baru

Taksonomi Bloom menginterpretasikan setiap tahapan perubahan pengetahuan atau kognitif sasaran penyuluhan mulai dari mengingat informasi terhadap inovasi yang diperoleh hingga mampu mengadopsi inovasi dalam artian dapat mengambil keputusan terhadap inovasi yang akan digunakan.

1. Mengingat

Sasaran atau khalayak sasaran penyuluhan mengingat dan menyatakan kembali informasi yang telah mereka terima. Tahapan ini dapat diartikan bahwa sasaran mengingat semua informasi yang diperkenalkan dari sebuah inovasi. Tahapan tersebut terdiri dari mengingat informasi, mengenali, membuat daftar, mendeskripsikan, memanggil kembali, memberi nama, dan menemukan

2. Memahami

Sasaran penyuluhan memahami arti dari suatu informasi dengan menafsirkan dan menerjemahkan apa yang telah dipelajari, sehingga pada akhirnya dapat mengambil sebuah makna dari informasi tersebut. Tahapan ini terdiri dari:

- Menerjemahkan (*Interpreting*)
- Memberikan contoh (*exemplifying*)
- Merangkum (*Summaris*)
- Menafsirkan (*Inferring*)
- Membuat parafrase (*Paraphrasing*)
- Mengklasifikasikan (*Classifying*)
- Membandingkan (*Comparing*)
- Menjelaskan (*Explaining*)

3. Mengaplikasikan

Menggunakan informasi pada situasi atau kondisi yang lain atau berbeda. Tahapan ini terdiri dari mengimplementasikan, melaksanakan, menggunakan, dan mengeksekusi. Tahapan ini membuktikan bahwa sasaran penyuluhan telah dapat mengaplikasikan inovasi pada suatu kondisi lingkungan yang berbeda.

4. Menganalisis

Menjabarkan informasi ke beberapa bagian untuk mengeksplorasi pemahaman dan hubungan, membandingkan, mengorganisir, mendekonstruksi, menemukan. Tahapan ini sasaran penyuluhan telah dapat menganalisis secara mendalam informasi yang diperoleh sehingga dapat menemukan perbandingan.

5. Mengevaluasi

Tahapan ini merupakan pemberian justifikasi terhadap suatu keputusan atau tindakan, mengecek, menghipotesis, mengkritik, membuat eksperimen, memberikan penilaian.

6. Menciptakan

Menghasilkan atau mengkreasikan gagasan, produk, atau cara-cara baru dalam memandang sesuatu. Tahapan ini terdiri dari merancang, mengkonstruksi, merencanakan, memproduksi, menciptakan, dan mengevaluasi.

b. Afektif (Sikap)

Aspek ini menghubungkan perilaku dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi, seperti perasaan, nilai-nilai, apresiasi, antusiasme, motivasi, dan sikap. Kelima kelompok besar kategori tersebut, dimulai dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks.

1. **Menerima fenomena:** kepedulian, kemauan untuk mendengar, perhatian khusus
2. **Memberikan respon kepada fenomena:** partisipasi aktif di sisi pembelajar. Memperhatikan dan bereaksi terhadap fenomena tertentu. Hasil belajar dapat menekankan pada kesepakatan dalam memberikan tanggapan, kemauan untuk merespon, ataupun kepuasan dalam memberikan tanggapan (motivasi)

3. **Penghargaan:** penghargaan ataupun nilai yang diberikan seseorang kepada obyek, fenomena, atau perilaku tertentu. Hal ini mulai dari sekedar menerima sampai dengan pernyataan komitmen yang sungguh-sungguh. Menilai didasarkan pada internalisasi akan satu set nilai-nilai tertentu, sementara itu, ciri-ciri dari nilai ini ditunjukkan oleh perilaku terbuka khaksar dan seringkali dapat diidentifikasi
4. **Pengorganisasian:** mengorganisasikan nilai-nilai dengan mengontraskan nilai-nilai yang berbeda, memecahkan masalah yang ada di antara nilai-nilai tersebut, dan menciptakan sistem nilai yang unik. Penekanan ada pada membandingkan, mengaitkan, dan mensintesakan nilai-nilai.
5. **Internalisasi nilai-nilai** (pembentukan karakter): memiliki sistem nilai yang mengontrol perilaku mereka. Perilaku mereka adalah tidak mudah menyerah, konsisten, dapat diterka, dan yang paling penting, karakteristik seorang pembelajar. Tujuan instruksional terarah pada pola umum penyesuaian khalayak sasaran (pribadi, sosial, emosional)

c. Psikomotorik (Keterampilan)

Termasuk dalam ranah psikomotorik ini adalah gerakan fisik, koordinasi, dan penggunaan area keterampilan motorik. Pengembangan keterampilan ini memerlukan latihan dan dalam pelaksanaannya akan diukur dalam istilah kecepatan, ketepatan, jarak, prosedur, ataupun teknik. Tujuh kategori disajikan di bawah ini, mulai dari yang paling sederhana s.d. yang paling rumit:

1. **Persepsi:** kemampuan untuk menggunakan tanda-tanda sensor untuk mengarahkan kegiatan motorik. Ini dimulai dari stimulasi sensor, melalui tanda seleksi, sampai dengan terjemahan.
2. **Penetapan:** kesiapan untuk bertindak. Termasuk di dalamnya kumpulan mental, fisik dan emosional. Ketiga kumpulan ini merupakan watak yang menentukan respon seseorang akan situasi yang berbeda-beda (terkadang disebut cara berpikir/pemikiran)

3. **Tanggapan Terkendali:** merupakan tahap-tahap awal dalam mempelajari keterampilan yang sulit, termasuk dalam tahap ini adalah imitasi dan coba-coba (*trial and error*). Penampilan akan cukup memadai apabila terus berlatih.
4. **Mekanisme:** ini merupakan tahap perantara dalam mempelajari suatu keterampilan yang sulit. Tanggapan hasil belajar harus menjadi kebiasaan dan gerakan dapat dilakukan dengan percaya diri dan mahir
5. **Tanggapan Terbuka yang kompleks:** penampilan aksi motorik yang sangat terampil yang melibatkan pola gerakan yang rumit. Penguasaan ditunjukkan dengan penampilan yang cepat, akurat, terkoordinasi dengan baik, hanya membutuhkan energi yang minimum. Termasuk dalam kategori ini adalah penampilan tanpa ragu-ragu, penampilan secara otomatis. Contohnya, para pemain terkadang mengeluarkan suara untuk menunjukkan kepuasan ataupun kata seru pada saat memukul bola tenis atau melempar bola karena mereka tahu dari apa yang dilakukan, hasil apa yang akan didapat.
6. **Adaptasi:** keterampilan dikembangkan dengan baik dan individu dapat memodifikasi pola pergerakan agar sesuai dengan persyaratan tertentu.
7. **Awal permulaan:** menciptakan pola pergerakan yang baru agar sesuai dengan situasi tertentu ataupun masalah khusus. Hasil belajar menekankan kreativitas yang didasarkan atas keterampilan yang sangat terlatih.
 - Menurut Dave (1975) terdapat ranah psikomotorik lain yaitu :
 1. **Imitasi:** mengamati dan menjadikan perilaku orang lain sebagai pola. Apa yang ditampilkan mungkin kualitas rendah . Contoh: menjiplak hasil karya seni
 2. **Manipulasi:** mampu menunjukkan perilaku tertentu dengan mengikuti instruksi dan praktek. Contoh: membuat hasil karya

sendiri setelah mengikuti pelajaran, ataupun membaca mengenai hal tersebut.

3. **Ketepatan:** meningkatkan metode supaya lebih tepat. Beberapa kekeliruan tampak jelas. Contoh: bekerja dan melakukan sesuatu kembali, sehingga menjadi “cukup baik.”
4. **Artikulasi:** mengkoordinasikan serangkaian tindakan, mencapai keselarasan dan internal konsistensi. Contoh: memproduksi film video yang menampilkan musik, drama, warna, suara dsb.
5. **Naturalisasi:** telah memiliki tingkat *performance* yang tinggi sehingga menjadi alami, dalam melakukan tidak perlu berpikir banyak. Misalkan: Michael Jordan bermain basket, Nancy Lopez memukul bola golf.

Menurut Harrow (1972) terdapat beberapa interpretasi ranah psikomotorik atau keterampilan yang lain yaitu :

1. Gerakan spontan/reaksi dari suatu stimulus
2. Gerakan-gerakan pokok/gerakan-gerakan dasar
3. Persepsi/opini/tanggapan terhadap stimuli
4. Kemampuan fisik : stamina yang harus dikembangkan untuk perkembangan selanjutnya
5. Gerakan-gerakan terlatih/gerakan tingkat tinggi yang telah dipelajari
6. Komunikasi saling berkaitan/bahasa tubuh yang efektif

C. Prinsip-Prinsip Penyuluhan

Prinsip adalah suatu kenyataan tentang kebijaksanaan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten. Prinsip penyuluhan berpegang pada 3 (tiga) aspek Mengerjakan, Akibat dan Asosiasi. Penyuluh harus selalu berpegang pada ketiga aspek tersebut sehingga tujuan penyuluhan dapat tercapai. Adapun penjabaran ketiga aspek tersebut adalah :

1. Mengerjakan, penyuluh harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan sesuatu.

2. Akibat, kegiatan penyuluhan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat.
3. Asosiasi, setiap kegiatan penyuluhan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya.

Prinsip penyuluhan telah dijabarkan secara detail oleh beberapa ahli, tentunya berbagai prinsip penyuluhan tersebut idealnya dapat diterapkan pada saat pelaksanaan penyuluhan di lapangan. Adapun prinsip penyuluhan oleh beberapa ahli sebagai berikut :

1. Prinsip-prinsip penyuluhan menurut Soekandar W (1973) :

- i. Penyuluhan seyogyanya diselenggarakan menurut keadaan yang nyata

Istilah keadaan atau situasi yang nyata, tercakup pula pengertian sumberdaya yang ada. Tersusunnya program dan jadwal waktu yang secara berangsur-angsur menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian diperlukan kerja sama yang baik dengan pihak penelitian atau pihak-pihak lainnya, sehingga dapat mengetahui dengan cermat potensi wilayah, keadaan lingkungan, kondisi sosial ekonomi, kondisi budaya tradisi, norma nilai-nilai dan kepercayaan berikut berikut permasalahannya.

Penilaian kondisi harus didasarkan pada ukuran-ukuran yang tepat, berdasarkan masalah tersebut, maka perlu disediakan waktu yang cukup untuk mengenal atau mengetahui segala kondisi yang diuraikan, sehingga betul-betul diperoleh gambaran yang mendekati kenyataan, karena ini merupakan langkah yang menentukan kegiatan selanjutnya.

- ii. Penyuluhan seharusnya ditujukan kepada kepentingan dan kebutuhan sasaran.

Penyuluhan yang didasarkan atas kepentingan dan kebutuhan sasaran akan lebih mudah dan lebih menarik. Sebab dengan demikian ada dorongan atau alasan (motif) bagi para nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan untuk melaksanakan apa yang dianjurkan para penyuluh.

Mereka akan lebih mudah berpartisipasi, jika apa yang direkomendasikan para penyuluh adalah berkaitan dengan kebutuhan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan beserta keluarganya. Cara pertama untuk mengetahui kebutuhan, kepentingan, dan permasalahan sasaran dapat dilakukan melalui wawancara, inventarisasi masalah atau sensus.

- iii. Penyuluhan ditujukan kepada seluruh keluarga nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan.

Di daerah pesisir dan pedesaan pada umumnya tiap anggota keluarga nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan terlibat dalam proses usaha perikanan dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarganya. Keluarga nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan merupakan suatu kesatuan kerja dilapangan maupun dalam rumah tangga. Seharusnya tiap anggota keluarga yang ikut dalam proses produksi dan pengolahan mendapat kesempatan dalam pengambilan keputusan mengenai upaya peningkatan kesejahteraan keluarga.

Kegiatan penyuluhan harus mengembangkan kesempatan, perhatian, dan partisipasi dalam usaha pendidikan pembangunan seluruh anggota keluarga nelayan. Maka biasanya dalam menyusun rencana kerja penyuluhan, selalu ada kegiatan-kegiatan penyuluhan dengan sasarannya bapak, ibu dan pemuda-pemuda nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan.

- iv. Penyuluhan adalah pendidikan untuk demokrasi.

Dalam proses pendidikan penyuluhan, dipergunakan cara-cara demokratis seperti mengikut sertakan orang-orang, pemikulan tanggung jawab bersama, melibatkan semua orang dalam program yang dibuat secara bersamaan untuk kepentingan bersama. Dengan demikian maka orang-orang tersebut akan menjadi percaya pada kesanggupannya menyelesaikan masalahnya dengan daya dan dana sendiri. Kegiatan dan sikap tersebut diatas mendidik para nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan mengarah kepada asas-asas demokratis.

- v. Harus ada kerjasama yang erat antara penyuluhan, penelitian dan pendidikan.

Dalam upaya yang terus menerus dalam peningkatan pendapatan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan dan keluarganya, maka mereka dituntut untuk selalu menerapkan teknologi yang lebih baru. Dengan demikian para penyuluh dituntut untuk selalu memperbaharui penguasaan teknologinya, sesuai dengan tuntutan kebutuhan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan. Berdasarkan hal itu maka para penyuluh perikanan supaya selalu berhubungan dengan sumber teknologi tersebut dalam hal ini lembaga penelitian. Disamping itu penyuluh harus selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui berbagai pendidikan.

- vi. Rencana-rencana kerja sebaiknya disusun bersama oleh penduduk setempat dan penyuluhan.

Menyusun rencana kerja secara bersama-sama dengan orang yang bersangkutan adalah tugas mendidik dari penyuluh. Maksudnya adalah agar mereka tertarik dengan rencana kerja yang disusun bersama. Maksudnya adalah agar mereka tertarik dengan rencana kerja yang disusun bersama. Prinsip keterlibatan seseorang tadi, mempunyai dasar psikologis yang baik sekali dan mendidik orang untuk bekerjasama atau bergotong royong.

- vii. Penyuluhan adalah luwes dan dapat menyesuaikan diri kepada perubahan.

Suatu sifat yang baik dari penyuluhan adalah keluwesannya untuk dapat berubah, bila keadaan dan kebutuhan dari nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan keluarganya telah berubah. Orang-orang yang biasa bekerjasama dengan penyuluhan akan mendapat pandangan dan berbagai keinginan baru.

Berdasarkan pengalamannya itu, mereka akan lebih dapat menilai kebutuhan-kebutuhannya yang baru secara lebih nyata. Penilaian kebutuhan yang lebih nyata ini sangat berguna bagi para penyuluh dalam

menentukan kebutuhan akan materi penyuluhan yang akan diberikan. Di pihak lain juga terjadi perubahan, misalnya muncul sumber pengetahuan baru, adanya teknologi baru, adanya permintaan pasar terhadap komoditi perikanan tertentu yang merangsang nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan untuk mengisi pangsa pasar tersebut. Menghadapi terjadinya perubahan-perubahan tersebut, maka diperlukan keluwesan dalam perencanaan kerja penyuluhan dan penentuan kebutuhan yang diperlukan oleh sasaran, dapat dijadikan patokan bahwa telah terjadi perubahan pada nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan yang mengarah kepada tercapainya tujuan yang diharapkan.

viii. Metode demonstrasi adalah gagasan dasar bagi penyuluhan.

Metode demonstrasi akan lebih efektif bila ditunjang oleh metode-metode yang lain yang sesuai dalam usaha menyebarluaskan pengetahuan dan keterampilan yang bersangkutan.

ix. Penilaian hasil penyuluhan harus didasarkan pada perubahan-perubahan yang terjadi pada sasaran.

Penyuluhan ditujukan untuk mempengaruhi perubahan perilaku pada sasaran. Penilaian tentang keberhasilan atau efektifitas penyuluhan didasarkan kepada perubahan-perubahan yang telah terjadi dipihak sasaran. Perubahan-perubahan tersebut dapat diukur baik dalam jumlah maupun mutunya. Perubahan tersebut dapat terjadi pada aspek-aspek pengetahuan, kebiasaan, kecakapan, keterampilan dari yang bersangkutan. Yang pada gilirannya akan meningkatkan aktifitas ekonomi, teknologi, sosial dan budaya.

2. Prinsip penyuluhan menurut Ralph W.Tyler

Prinsip penyuluhan menurut Ralph W.Tyler (1949) sebagai proses belajar. Proses belajar merupakan rangkaian kegiatan atau tahapan yang dilalui seseorang melalui pengalaman belajar. Sedangkan, pengalaman belajar merupakan interaksi seseorang sebagai warga belajar terhadap materi yang diajarkan sehingga seseorang tersebut dapat memberikan

reaksi baik secara fisik maupun mental. Materi yang diajarkan dapat bersumber dari kondisi eksternal yang terdapat di lingkungan warga belajar berada.

Keefektifan belajar dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor yaitu isi atau materi yang diajarkan, fasilitas pengajaran, pengajar, dan lingkungan fisik yang berada di sekitar lokasi tempat pengajaran. Proses belajar dalam penyuluhan merupakan proses belajar dalam pendidikan orang dewasa. Beberapa prinsip belajar yang berkaitan dengan penyuluhan yaitu :

1. Kesiapan (*readiness*) yang merupakan kesiapan warga belajar baik secara fisik maupun mental siap dalam menerima pelajaran.
2. Hubungan (*Assosiation*): Suatu prinsip belajar yg menghubungkan Pengalaman Belajar dengan mempertimbangkan latar belakang warga belajar.
3. Akibat (*Effect*) : Prinsip belajar yang memperhatikan kepuasan dan kekecewaan dalam belajar. Akibat tersebut tergantung pada suasana belajar, materi yang diajarkan, pengajar, media pengajaran, dan perencanaan atau proses yang terjadi pada setiap tahapan belajar
4. Latihan (*Practice*) yaitu keterlibatan penggunaan panca indera dalam rangkaian tahapan proses belajar sehingga dapat tercapai tujuan belajar yang telah ditetapkan antara pengajar dan warga belajar atau dalam dunia penyuluhan antara penyuluh dengan sasaran penyuluhan.

Beberapa strategi penyelenggaraan proses belajar bagi warga belajar penyuluhan :

1. Warga Belajar diusahakan supaya dapat berperan aktif dan berpartisipasi dalam perumusan tujuan belajar. Tujuan belajar bagi warga belajar penyuluhan yaitu mengubah perilaku mereka sendiri, sehingga pengajar atau penyuluh harus mempraktekkan berbagai

jenis perubahan perilaku. Semakin banyak praktek tersebut sebagai banyak juga pengalaman belajar mereka

2. Kondisi belajar diusahakan dalam suasana yang menyenangkan, sehingga menciptakan interaksi yang kondusif antara pengajar dan warga belajar yang pada akhirnya berdampak pada pencapaian tujuan belajar bersama. Suasana sosial yang hangat dalam ruang belajar, tidak menegangkan, hubungan saling percaya satu sama lain, menimbulkan rasa percaya diri dalam kebebasan mengemukakan pendapat, dan bersahabat.
3. Berorientasi pada pemecahan masalah (*problem solving*) warga belajar itu sendiri, sehingga mereka pada akhirnya dapat membantu dirinya sendiri setelah dirasa cukup mendapatkan pengalaman belajar yang bersumber dari pengajar atau penyuluh.
4. Warga belajar penyuluhan bersama dengan pengajar atau penyuluh untuk menentukan sendiri kecepatan belajar sesuai dengan kemampuan warga belajar bersangkutan.
5. Warga belajar penyuluhan menerima *feedback* atau timbal balik tentang kemajuan ke arah pencapaian tujuan yg telah ditentukan. Timbal balik tersebut dapat berupa evaluasi terhadap kemajuan yang telah tercapai dan pemberian apresiasi atau penghargaan terhadap prestasi yang telah warga belajar penyuluhan.

BAB IV. ASAS DAN PENDEKATAN PENYULUHAN.

A. Asas Penyuluhan

Penyuluhan diselenggarakan berasaskan demokrasi, manfaat, kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, kerja sama, partisipatif, kemitraan, berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan, dan bertanggung gugat. Penjelasan secara terinci mengenai asas penyuluhan tersebut sebagai berikut :

1. “Penyuluhan berasaskan demokrasi” yaitu penyuluhan yang diselenggarakan dengan saling menghormati pendapat antara pemerintah, pemerintah daerah, dan pelaku utama serta pelaku usaha lainnya.
2. “Penyuluhan berasaskan manfaat” yaitu penyuluhan yang harus memberikan nilai manfaat bagi peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan perilaku untuk meningkatkan produktifitas, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha.
3. “Penyuluhan berasaskan kesetaraan” yaitu hubungan antara penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha yang harus merupakan mitra sejajar.
4. “Penyuluhan berasaskan keterpaduan” yaitu penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan secara terpadu antar kepentingan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
5. “Penyuluhan berasaskan keseimbangan” yaitu setiap penyelenggaraan penyuluhan harus memperhatikan keseimbangan antara kebijakan, inovasi teknologi dengan kearifan masyarakat setempat, pengarus utamaan gender, keseimbangan pemanfaatan sumberdaya dan kelestarian lingkungan, dan keseimbangan antar kawasan yang maju dengan kawasan yang relatif masih tertinggal.
6. “Penyuluhan berasaskan keterbukaan” yaitu penyelenggaraan penyuluhan dilakukan secara terbuka antara penyuluh dan pelaku utama serta pelaku usaha.
7. “Penyuluhan berasaskan kerjasama” yaitu penyelenggaraan penyuluhan harus diselenggarakan secara sinergis dalam kegiatan pembangunan perikanan dan sektor lain yang merupakan tujuan bersama antara pemerintah dan masyarakat.
8. “Penyuluhan berasaskan partisipatif” yaitu penyelenggaraan penyuluhan yang melibatkan secara aktif pelaku utama dan pelaku usaha dan penyuluh sejak perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

9. “Penyuluhan berasaskan kemitraan” yaitu penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menghargai, saling menguntungkan, saling memperkuat, dan saling membutuhkan antara pelaku utama, dan pelaku usaha yang difasilitasi oleh penyuluh.
10. “Penyuluhan berasaskan berkelanjutan” yaitu penyelenggaraan penyuluhan dengan upaya secara terus menerus dan berkesinambungan agar pengetahuan, keterampilan, serta perilaku pelaku utama dan pelaku usaha semakin baik dan sesuai dengan perkembangan sehingga dapat terwujud kemandirian.
11. “Penyuluhan berasaskan berkeadilan” yaitu penyelenggaraan penyuluhan yang memposisikan pelaku utama dan pelaku usaha berhak mendapatkan pelayanan secara proposional sesuai dengan kemampuan, kondisi, serta kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.
12. “Penyuluhan berasaskan pemerataan” yaitu penyelenggaraan penyuluhan harus dapat dilaksanakan secara merata bagi seluruh wilayah Republik Indonesia dan segenap lapisan pelaku utama dan pelaku usaha.
13. “Penyuluhan berasaskan bertanggung gugat” yaitu bahwa evaluasi kinerja penyuluhan dikerjakan dengan membandingkan pelaksanaan yang telah dilakukan dengan perencanaan yang telah dibuat dengan sederhana, terukur, dapat dicapai, rasional, dan kegiatannya dapat dijadwalkan.

B. Pendekatan Penyuluhan

1. Pendekatan Penyuluhan Secara Partisipatif

- ✓ Partisipatif adalah partisipasi dalam arti bahwa masyarakat terlibat langsung dalam setiap tahapan proses (Robert Chambers)
- ✓ Partisipasi adalah proses pemberdayaan masyarakat sehingga mampu menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapinya (Pretty dkk, 1995)
- ✓ Partisipasi adalah pengambilan bagian, pengikutsertaan (*participation*, Kamus Inggris)

Jadi pengertian partisipatif adalah pengambilan bagian/pengikutsertaan atau masyarakat terlibat langsung dalam setiap tahapan proses pembangunan mulai dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) sampai kepada monitoring dan evaluasi (*controlling*) → POAC

Tingkat partisipasi dalam masyarakat tidak sama tergantung sejauhmana keterlibatan mereka dalam pemecahan masalah yang dihadapi. Bentuk-bentuk pengambilan bagian atau pengikutsertaan (keterlibatan langsung) masyarakat dalam pembangunan perikanan dapat berupa: pengambilan keputusan bersama pada semua aktivitas, belajar bersama, bertanggung jawab, menerima manfaat bersama, melakukan *monitoring*, dan evaluasi bersama-sama. Pendekatan partisipatif memberikan keuntungan, antara lain:

- ✓ Orang-orang akan lebih energik
- ✓ Lebih komit
- ✓ Lebih bertanggung jawab, bila mereka mengontrol lingkungan sendiri dibanding hal ini dilakukan oleh suatu “kewenangan” dari luar.

2. Pendekatan Penyuluhan Secara Kemitraan

Pengertian penyuluhan kemitraan adalah proses penyuluhan kemitraan adalah kegiatan belajar berkelanjutan dari nelayan ke nelayan, pembudidaya ikan ke pembudidaya ikan, dan pengolah ikan ke pengolah ikan yang dikelola oleh masyarakat desa dipandu oleh nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan pemandu/fasilitator desa berdasarkan kemitraan dengan anggota keluarga, nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan lain dan berbagai organisasi seperti penyuluhan, penelitian, pengaturan, pelayanan, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain yang terkait.

Ciri Proses Penyuluhan Kemitraan :

- ✓ Di setiap desa ada nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan pemandu/fasilitator desa yang dipilih oleh masyarakat,

- ✓ Dana untuk kegiatan penyuluhan di desa dikelola oleh masyarakat,
- ✓ Pengembangan usaha perikanan berpangkal pada usaha perikanan keluarga sebagai unit ekonomi dasar,
- ✓ Kegiatan penyuluhan dilaksanakan secara merata untuk keluarga, kelompok dan masyarakat,
- ✓ Adanya kemitraan antara nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dengan keluarganya dan dengan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan lain dalam kelompok dan antara organisasi nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dengan organisasi lain,
- ✓ Kegiatan belajar nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan berpusat di desa yang mendapat dukungan dari lembaga-lembaga: penyuluhan, penelitian, perdagangan, perindustrian, dan pemerintah daerah.

Tujuan proses penyuluhan kemitraan

- ✓ Lebih berdayanya keluarga dan kelompok dalam mengelola usaha perikanan yang menguntungkan.
- ✓ Lebih kuatnya jaringan antar pelaku usaha dan sistem pengelolaan usaha
- ✓ Terciptanya pelaku utama/pelaku usaha yang mampu memanfaatkan informasi, pasar, sumber dana dan prasarana serta menentukan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki
- ✓ Terciptanya desa sebagai pusat kegiatan belajar, pengembangan teknologi spesifik lokalita, dan interaksi antara nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan, penyuluh, peneliti dan pengusaha.
- ✓ Lebih meningkatnya peranan dalam perencanaan dan produktivitas usaha wanita dan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan miskin.

Pendekatan dalam Metode Penyuluhan Perikanan dapat bersifat :

1. Persuasif

Penyuluh perikanan dalam melaksanakan tugasnya harus mampu meyakinkan khalayak-nya, sehingga mereka merasa tertarik dan yakin terhadap hal-hal yang akan disampaikan.

2. Edukatif

Penyuluh perikanan harus bersikap dan berperilaku sebagai pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing sasarnya.

3. Komunikatif

Penyuluh perikanan harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu pembicaraan atau komunikasi yang bersifat akrab, terbuka, dan timbal balik

4. Akomodatif

Penyuluh perikanan harus mampu mengakomodasikan, menampung permasalahan di bidang perikanan yang diajukan oleh sasaran, dan memberikan jalan pemecahannya dengan sikap dan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh sasaran.

5. Fasilitatif

Penyuluh perikanan harus mampu memanfaatkan jejaring kerja penyuluhan perikanan untuk menghubungkan antara sasaran dengan pihak lain sebagai sumber teknologi, sumber permodalan, sumber informasi, akses pasar.

Metode penyuluhan berdasarkan sifatnya dapat menggunakan salah satu atau kombinasi dari berbagai metode, yaitu:

1. Bersifat massal

Metode penyuluhan yang sasarnya berupa komunitas masyarakat luas. Media yang digunakan: media elektronik (internet, televisi, radio,

film, video), dan media cetak (koran, majalah, brosur, poster, pameran, dsb)

2. Bersifat kelompok

Metode penyuluhan yang sasarannya berupa kelompok masyarakat tertentu dan telah terorganisir baik formal maupun informal. Metode yang dapat digunakan: media khusus, seperti sekolah lapang, studi banding, demonstrasi teknis, kolam percontohan, lokakarya, temu usaha, temu karya, temu wicara, dan temu lapang.

3. Bersifat individu

Metode penyuluhan yang sasarannya perorangan atau individu. Metode yang dapat digunakan berupa kunjungan rumah atau lahan usaha, dan magang

Materi penyuluhan dapat mencakup satu aspek atau lebih, yaitu :

1. Aspek Teknologi : penerapan IPTEK di bidang perikanan atau bidang lainnya untuk meningkatkan produktivitas secara bertanggung jawab.
2. Aspek Manajemen : penerapan manajemen yang baik dalam rangka efektivitas dan efisiensi untuk meningkatkan kinerja usaha perikanan.
3. Aspek Ekonomi : pemanfaatan sumberdaya ekonomi yang meliputi antara lain penyediaan modal, sarana produksi, informasi potensi sumberdaya, informasi prospek dan peluang usaha atau jejaring pasar yang diperlukan untuk pengembangan usaha dan meningkatkan kesejahteraannya.
4. Aspek Ekologis : pemahaman dan kesadaran tentang arti penting kelestarian sumberdaya alam agar usaha/kegiatannya dapat berkelanjutan dan menjadi lebih baik pada masa yang akan datang, serta tidak merugikan masyarakat dan lingkungannya.
5. Aspek Sosial dan Budaya : pengembangan sosial dan kesadaran kultural untuk meningkatkan kemampuan dalam menyalurkan aspirasi serta mengembangkan harkat kemanusiaan dan kesejahteraannya, serta dengan mempertimbangkan adat positif setempat.

6. Aspek Hukum : pemberian informasi tentang peraturan perundang-undangan, sehingga sasaran menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara (khususnya dalam kegiatan bidang perikanan).

BAB V. TUGAS DAN PERAN PENYULUH.

Penyuluh Perikanan (Permen No. PER/19/M.PAN/10/2008) adalah “Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk penyuluhan perikanan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang”. Pelaku penyuluh perikanan menurut Peraturan Menteri tersebut meliputi :

1. Penyuluh fungsional adalah PNS yang diangkat oleh pejabat berwenang dalam jabatan fungsional penyuluh.
2. Penyuluh Non fungsional adalah PNS bukan pejabat fungsional penyuluh yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas penyuluhan perikanan
3. Penyuluh Tenaga Kontrak adalah tenaga profesional yang diberi tugas dan wewenang oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas penyuluhan perikanan dalam suatu ikatan kerja selama jangka waktu tertentu.
4. Penyuluh swasta adalah seseorang yang diberi tugas oleh perusahaan yang terkait dengan usaha perikanan, baik secara langsung atau tidak langsung, melaksanakan tugas penyuluhan perikanan
5. Penyuluh mandiri adalah seseorang yang atas kemauan sendiri melaksanakan penyuluhan perikanan.
6. Penyuluh Kehormatan adalah seseorang yang bukan petugas penyuluhan perikanan yang karena jasanya diberi penghargaan sebagai penyuluh kehormatan oleh menteri kelautan dan perikanan berdasarkan rekomendasi dari kepala dinas kelautan dan perikanan dan wakil masyarakat.

Tugas pokok penyuluh (Permen No.PER/19/M.PAN/10.2008) “Tugas pokok penyuluh perikanan adalah melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan perikanan”.

Menurut Roger dan Shoemaker (1971) ada beberapa tugas utama dari seorang penyuluh, yaitu :

1. Menumbuhkan keinginan masyarakat untuk melakukan perubahan;
2. Membina *change relationship* atau hubungan untuk suatu perubahan;
3. Mendiagnosa permasalahan yang dihadapi masyarakat;
4. Menerjemahkan keinginan masyarakat menjadi tindakan nyata;
5. Menjaga kestabilan perubahan dan mencegah terjadinya dropout atau kemandegan;
6. Mencapai suatu terminal hubungan dengan masyarakat setempat, sehingga para nelayan atau pembudidaya ikan tersebut dapat menjadi agen perubahan dirinya sendiri, sedangkan penyuluh bisa berpindah tugasnya ketempat lain.

Tugas Pokok Penyuluh Perikanan (Pusbangluh, 2009) :

1. Identifikasi potensi wilayah dan ekosistem perairan;
2. Identifikasi kebutuhan teknologi Kelautan Perikanan;
3. Penyusunan program dan rencana kerja penyuluhan kelautan perikanan;
4. Penyusunan penerapan dan pengembangan metode dan materi penyuluhan kelautan perikanan;
5. Bimbingan dan pembinaan kemampuan teknis biofisik kelautan perikanan;
6. Pembinaan pengelolaan ekosistem perairan;
7. Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan bisnis perikanan;
8. Bimbingan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut;
9. Pengembangan swadaya dan swakarya pelaku utama;

10. Pembinaan kesadaran dan penataan hukum pemanfaatan sumberdaya laut dan ikan;
11. Pembinaan peningkatan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha dalam pengembangan bisnis perikanan;
12. Penumbuhan laboratorium penyuluhan kelautan perikanan;
13. Penumbuhan jejaring kerja antara sumber informasi dan teknologi dengan pengguna;
14. Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan kelautan perikanan;
15. Evaluasi dampak penyuluhan kelautan perikanan : Pengembangan metode/sistem kerja penyuluhan kelautan perikanan;
16. Pengembangan wirausaha bidang kelautan perikanan;
17. Penggalangan solidaritas dan kepedulian dalam menjaga/memelihara sarana prasarana kelautan perikanan;
18. Pengembangan profesi penyuluh kelautan perikanan.

Peran Penyuluh :

a. Penyuluh sebagai penasehat

Petugas penyuluh yang siap mendengarkan nelayan pembudidaya dan pengolah ikan, membantu memecahkan masalah.

- ✓ Bertindak sebagai dinamisator => mengubah dan membangkitkan semangat perhatian nelayan, pembudidaya pengolah ikan dan
- ✓ Bertindak sebagai motivator => menggerakkan usaha yang lebih baik, menguntungkan dan berorientasi bisnis.

b. Penyuluh sebagai teknisi

Kredibilitas seorang penyuluh ditentukan oleh kemampuan penguasaan/kompetensi teknis yang akan dijadikan bahan alih teknologi maupun materi-materi perubahan-perubahan yang disarankan. Upaya penyuluh agar tetap sebagai sumber teknologi bagi nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan dimana upaya terapan selalu berkembang, dan upaya yang dapat dilakukan:

- ✓ Latihan

- ✓ Konsultasi dengan penyuluh ahli / spesialis
- ✓ Aktif mengikuti pertemuan, diskusi, sareshan
- ✓ Aktif mengikuti informasi
- ✓ Berlangganan surat kabar di bidang perikanan

c. Penyuluh sebagai penghubung

Sebagai penghubung antara berbagai kelembagaan yang membina keluarga nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan. Penyuluh sebagai penghubung antara peneliti dengan nelayan pembudidaya dan pengolah ikan.

d. Penyuluh sebagai organisatoris

Bagaimana cara mengorganisir nelayan pembudidaya dan pengolah ikan dalam kelompok masing-masing yang lebih efektif, bagaimana menetapkan pengurus kelompok, bagaimana mengatur kegiatan kelompok, mengadakan pembagian kerja. Diarahkan dalam membentuk dan mengembangkan kelompok nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan (perkembangan kelompok tani menjadi ukuran tingkat keberhasilan kegiatan penyuluh).

e. Penyuluh sebagai agen pembaharu ditunjang oleh beberapa faktor:

- ✓ Gencarnya usaha promosi seperti sering berada dilapangan, sering kontrak dengan kliennya dalam menyebarkan ide baru.
- ✓ Berorientasi pada klien, penyuluh lebih berorientasi dalam memenuhi harapa-harapan masyarakat.
- ✓ Kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat.
- ✓ Kredibilitas agen pembaharu/apa yang datang dari agen pembaharu akan mudah lebih diterima.

Peran penyuluh :

1. Bungaran Saragih (2001) : sebagai fasilitator, komunikator, motivator, konsultan, dan penggerak petani nelayan dalam pembangunan.
2. Kurt Lewin (1945) : pencairan diri dengan masyarakat sasaran, menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan, dan pemantapan hubungan dengan masyarakat sasaran.

3. Lippit (1956) : Pengembangan kebutuhan untuk melakukan perubahan-perubahan, menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan, memantapkan hubungan dengan masyarakat sasaran.
4. Mosher (1958) ; sebagai guru, penganalisa, penasehat, organisator.

BAB VI. METODE PENYULUHAN

Penyuluhan dilaksanakan dengan menggunakan metode tertentu yang disesuaikan dengan isi/materi pesan yang disampaikan, media yang digunakan serta struktur sosial dari sasaran penyuluhan diantaranya umur, pendidikan, tingkat pendapatan, jenis kelamin, pekerjaan dan adat istiadat/budaya. Apabila penyuluh sebagai sumber pesan telah mengetahui sekaligus menyesuaikan ketiga unsur tersebut diharapkan metode atau teknik penyuluhan yang ditetapkan dapat tepat guna sehingga tujuan penyuluhan dapat tercapai.

Metode:

Cara menyampaikan pesan/materi kepada peserta, apakah pesan secara lisan, tertulis, tergambar, menggunakan gerak atau lainnya. Cara apa yang digunakan pengajar/penyuluh dalam menyampaikan pesan berupa materi pengajaran kepada sasaran.

1. Pengertian Metode Penyuluhan Perikanan

Cara atau teknik penyampaian materi (isi pesan) penyuluhan oleh para penyuluh kepada sasaran (pelaku utama dan pelaku usaha) beserta keluarganya baik secara langsung maupun tidak langsung, agar mereka tahu, mau, dan mampu menerapkan inovasi.

2. Tujuan Memilih Metode Penyuluhan:

- a. Agar penyuluh dapat menetapkan suatu metode atau kombinasi dari beberapa metode yang tepat dan berhasil guna.

- b. Agar kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan dapat menimbulkan perubahan yang dikehendaki, yaitu perubahan perilaku nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan serta anggota keluarganya, dapat berdayaguna dan berhasil guna.

3. Dasar Pertimbangan Pemilihan Metode Penyuluhan Perikanan

✓ Sasaran

- Tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap sasaran,
- Sosial budaya, dan
- Jumlah sasaran.

✓ Sumberdaya Penyuluh

- Kemampuan Penyuluh
- Materi penyuluhan
- Sarana dan biaya penyuluhan
- Keadaan daerah
- Musim
- Keadaan Usaha perikanan
- Keadaan lapangan

✓ Kebijakan Pemerintah.

4. Langkah-langkah Pemilihan Metode Penyuluhan Perikanan

✓ Menghimpun dan Menganalisa Data

- Sasaran (umur, jenis kelamin, pendidikan, adat kebiasaan, bentuk usaha perikanan, ketersediaan sebagai nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan demonstrator dan jumlah mereka yang maju).
- Penyuluh dan kelengkapannya (kemampuan penyuluh, materi, sarana dan prasarana dan biaya).
- Keadaan daerah dan kebijaksanaan pemerintah (musim/iklim, keadaan lapangan, perhubungan jalan, listrik dan telepon, kebijaksanaan pemerintah).

✓ **Menetapkan alternatif Metode Penyuluhan**

- Metode-metode dengan pendekatan masal dipergunakan untuk menarik perhatian, menumbuhkan minat dan keinginan, serta memberikan informasi selanjutnya.
- Metode-metode dengan pendekatan kelompok biasanya dipergunakan untuk dapat memberikan informasi yang lebih rinci tentang suatu teknologi atau praktek.
- Metode-metode dengan pendekatan perorangan, sangat berguna dalam tahap mencoba hingga menerapkan.

✓ **Menetapkan Metode Penyuluhan**

Setelah penyuluh menetapkan alternatif metode penyuluhan, barulah memikirkan apakah metode-metode itu dapat dilaksanakan dan cocok dengan keadaan lapangan dan sasaran. Bagi penyuluh yang sudah berpengalaman tahapan ini sangat mudah baginya dan langsung dapat memilih metode yang cocok. Misalnya dalam melaksanakan demonstrasi ia harus menentukan lokasi demonstrasi dan siapa diantara sasaran yang bersedia menjadi demonstratornya.

5. Penggolongan Metode Penyuluhan:

a. Berdasarkan Teknik Komunikasi :

✓ Metode Penyuluhan Langsung

Metode Penyuluhan Langsung (*direct communication*) dimana para penyuluh secara langsung bertatap muka dan berdialog dengan para pembudidaya/ masyarakat nelayan atau keluarganya. Termasuk dalam metode ini antara lain : demonstrasi, ceramah, kursus tani, obrolan sore.

✓ Metode Penyuluhan Tidak Langsung

Metode Penyuluhan Tidak langsung (*indirect communication*), dimana para penyuluh tidak berhadapan langsung dengan para pembudidaya/masyarakat nelayan dan atau keluarganya melainkan melalui perantara (media komunikasi). Termasuk dalam

metode ini antara lain : pemasangan poster, penyebaran brosur/ leaflet/majalah, siaran radio dan televisi, pemutaran slide dan film.

b. Berdasarkan Jumlah Sasaran yang Dicapai :

✓ Pendekatan Perorangan

Penyuluh berhubungan dengan para pembudidaya/ masyarakat nelayan dan keluarganya secara perorangan baik langsung maupun tidak langsung. Beberapa metode penyuluhan yang termasuk dalam golongan ini antara lain: kunjungan rumah/tempat usaha, surat menyurat, hubungan telepon.

✓ Pendekatan Kelompok

Penyuluh berhubungan dengan sekelompok pembudidaya/masyarakat nelayan dan atau keluarganya. Metode penyuluhan yang termasuk dalam golongan ini antara lain: demonstrasi, diskusi, kursus tani, karyawisata, pertemuan kelompok.

✓ Pendekatan Massal

Penyuluh berhubungan dengan para pembudidaya/masyarakat nelayan beserta keluarganya secara massal. Metode penyuluhan yang termasuk dalam golongan ini antara lain : siaran radio, siaran televisi, berita di koran/majalah, pemasangan poster/spanduk.

c. Berdasarkan Indera Penerima dari Sasaran :

✓ Melalui Indera Penglihatan

Dalam metode ini materi penyuluhan diterima sasaran melalui indera penglihatan. Contoh: penyebaran bahan cetakan, album foto dan slide tanpa suara.

✓ Melalui Indera Pendengaran

Dalam metode ini materi penyuluhan diterima sasaran melalui indera pendengaran, Contoh: hubungan telepon, obrolan sore, pemutaran tape recoder dan siaran pedesaan.

✓ Melalui Kombinasi Indera Penerima

Dalam metode ini materi penyuluhan diterima oleh sasaran melalui kombinasi antara indera penglihatan, indera pendengaran, penciuman serta perabaan. Contoh: demonstrasi cara/hasil, pemutaran film, pemutaran video dan siaran televisi.

6. Hubungan Proses Komunikasi, Proses Adopsi dan Berbagai Metode Penyuluhan

Di dalam penyuluhan untuk melakukan komunikasi memerlukan tahapan proses komunikasi, pendekatan metode penyuluhan berdasarkan sasaran serta tahapan proses adopsi sehingga pelaksanaan penyuluhan dapat berjalan lancar.

Teknik :

Bagaimana memperlakukan pesan-pesan yang akan disampaikan. Perlakuan-perlakuan yang diciptakan pengajar/penyuluh terhadap pesan yang akan disampaikan sejak persiapan sampai pengakhiran.

BAB VII. PENERIMA MANFAAT DALAM PENYULUHAN PERIKANAN

A. Pengertian

Selama ini dalam penyuluhan banyak disebut adanya sasaran atau obyek penyuluhan. Sasaran penyuluhan perikanan merupakan pelaku utama usaha perikanan yang terdiri dari Nelayan, Pembudidaya ikan, Pengolah ikan, Pemasar Ikan dan keluarganya serta masyarakat pesisir lainnya. Pengertian tersebut telah menempatkan mereka dalam kedudukan “yang lebih rendah” dibandingkan para penentu kebijakan pembangunan perikanan dan kelautan, para Penyuluh Perikanan, dan Pemangku kepentingan pembangunan perikanan yang lainnya. Sehingga Mardikanto (1996) telah mengganti istilah “sasaran penyuluhan” menjadi “penerima manfaat”.

Dalam pengertian “penerima manfaat” tersebut, terkandung makna bahwa:

1. Berbeda dengan kedudukannya sebagai “sasaran penyuluhan”, sebagai penerima manfaat, Nelayan, Pembudidaya ikan, Pengolah ikan, dan keluarganya serta masyarakat pesisir lainnya memiliki kedudukan yang setara dengan penentu kebijakan, penyuluh dan pemangku kepentingan bisnis perikanan lainnya.
2. Penerima manfaat bukanlah obyek atau “sasaran tembak” yang layak dipandang rendah oleh penentu kebijakan dan para penyuluh, melainkan ditempatkan dalam posisi terhormat yang perlu dilayani dan atau difasilitasi sebagai rekan sekerja dalam mensukseskan pembangunan perikanan.
3. Berbeda dengan kedudukannya sebagai “sasaran penyuluhan” yang tidak punya pilihan atau kesempatan untuk menawar setiap materi yang disuluhkan selain harus menerima/mengikutinya, penerima manfaat memiliki posisi tawar yang harus dihargai untuk menerima atau menolak inovasi dan atau teknologi yang disampaikan penyuluhnya.
4. Penerima manfaat tidak berada dalam posisi dibawah penentu kebijakan dan para penyuluh, melainkan dalam kedudukan setara dan bahkan sering justru lebih tinggi kedudukannya, dalam arti memiliki kebebasan untuk mengikuti atau menolak inovasi dan atau teknologi yang disampaikan oleh penyuluhnya.
5. Proses belajar yang berlangsung antara penyuluh dan penerima manfaatnya bukanlah bersifat vertikal (penyuluh mengkurui penerima manfaatnya), melainkan proses belajar bersama yang partisipatif.

B. Ragam Penerima Manfaat Penyuluhan Perikanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per. 13/Men/2011 tentang pedoman penyusunan program penyuluhan perikanan didefinisikan bahwa penyuluhan perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas,

efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dibidang perikanan.

Dari pengertian penyuluhan perikanan diatas mengandung pengertian bahwa kegiatan penyuluhan perikanan secara langsung diperuntukkan bagi pelaku utama dan pelaku usaha dan keluarganya. Secara tidak langsung keberhasilan penyuluhan perikanan juga akan melibatkan banyak para pemangku kepentingan.

Hal ini juga mendukung sektor Perikanan yang berarti semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan secara ber kelanjutan, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.

Pada hakekatnya keberhasilan Penyuluhan perikanan tidak hanya tergantung pada efektifitas pembelajaran dan komunikasi antara penyuluh dengan para pelaku utama perikanan yaitu nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan penjual ikan serta keluarganya, tetapi juga ditentukan oleh perilaku/kegiatan pemangku kepentingan yang lain seperti: produsen sarana produksi, penyalur kredit, peneliti, akademisi, LSM dll.

Para pemangku kepentingan perikanan tersebut, selain sebagai *agent of development* sekaligus juga turut menikmati manfaat kegiatan penyuluhan perikanan. Selain hal tersebut, banyak pengalaman menunjukkan bahwa perkembangan dan kelambanan pelaksanaan penyuluhan perikanan seringkali tidak disebabkan oleh perilaku para pelaku utama, tetapi juga ditentukan oleh perilaku, kebijakan, dan komitmen papan atas untuk benar benar melayani/membantu masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha perikanan agar mereka bisa hidup lebih sejahtera.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penerima manfaat atas keberhasilan program penyuluhan perikanan secara umum adalah :

1. Pelaku utama dalam bisnis perikanan adalah para nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya. Nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan; mereka terdiri dari nelayan buruh atau anak buah kapal maupun pemilik kapal/ usahanya. Pembudidaya ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pembudidayaan ikan, ada yang statusnya sebagai pekerja/buruh dan juga pemilik usahanya. Pengolah ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pengolahan ikan, mereka juga sama akan terdiri para buruh/pekerja dan juga ada yang pemilik usaha pengolahannya. Para pelaku utama ini adalah juga beserta keluarga intinya.
2. Pelaku usaha perikanan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha perikanan, para pelaku usaha perikanan bisa terdiri dari usaha perikanan tangkap, usaha perikanan budidaya, dan usaha pengolahan dan pemasaran ikan. Para pelaku usaha perikanan ini terdiri dari tingkat menengah sampai ke tingkat industri.
3. Penentu kebijakan adalah pemerintah yang terdiri dari aparat birokrasi pemerintah yaitu badan eksekutif, legislatif dan yudikatif sebagai perencana, pelaksana, dan pengendali dan pengawas kebijakan pembangunan perikanan. Termasuk dalam kelompok penentu kebijakan adalah elit masyarakat mulai dari aras terbawah (desa) yang secara aktif dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan implemetasi kebijakan pembangunan perikanan.
4. Pemangku kepentingan yang lain, yang ikut mendukung/memperlancar kegiatan pembangunan perikanan, yang termasuk dalam kelompok ini adalah :

- a. Peneliti yang berperan dalam : penemuan, pengujian, dan pengembangan teknologi dan inovasi yang diperlukan oleh pelaku utama.
- b. Produsen sarana produksi dan peralatan/permesinan perikanan, yang dibutuhkan untuk penerapan teknologi dan inovasi yang dihasilkan oleh para peneliti.
- c. Pelaku bisnis (distributor, penyalur/pengecer) sarana produksi dan peralatan/permesinan perikanan serta kapal perikanan yang dibutuhkan dalam jumlah, mutu, waktu dan tempat yang tepat, serta pada tingkat harga yang terjangkau oleh pelaku usaha dan pelaku utama.
- d. Pers, media-masa dan pusat-pusat informasi yang menyebarkan informasi pasar (permintaan dan penawaran serta harga produk yang dihasilkan dan dibutuhkan), inovasi dan teknologi yang dihasilkan para peneliti, serta jasa lain yang diperlukan pelaku utama.
- e. Aktifitas LSM, tokoh masyarakat, dll yang berperan sebagai organisator, fasilitator, dan penasehat pelaku utama.
- f. Budayawan, Artis, dll. yang berperan dalam diseminasi inovasi dan teknologi, serta promosi produk yang dihasilkan maupun yang dibutuhkan pelaku utama.

C. Karakteristik Penerima Manfaat (Pelaku Utama)

Pelaku utama perikanan sangat beragam yang terdiri dari para nelayan, pembudi daya ikan, dan pengolah ikan. Karakteristik masing-masing kelompok pelaku utama sebagai penerima manfaat sangat penting dalam proses penyuluhan perikanan. Hal ini terkait dengan pemilihan dan penetapan : metoda, materi, waktu, tempat, dan perlengkapan penyuluhan yang diperlukan.

Adapun karakteristik para penerima manfaat khususnya pelaku utama yang perlu dicermati adalah :

1. Karakteristik pribadi, yang mencakup : jenis kelamin, status, umur, suku/etnis, dan agama.
2. Karakteristik pekerjaan: nama, status, tugas dan tanggung jawab.
3. Status sosial ekonomi, yang meliputi : pendidikan, pendapatan, dan keterlibatannya dalam kelompok/organisasi kemasyarakatan.
4. Perilaku keinovatifan sebagaimana dikelompokkan oleh Rogers (1971) yang terdiri dari: perintis (*inovator*), pelopor (*early adopter*), penganut dini (*early majority*), penganut lambat (*late majority*) dan kelompok yang tidak bersedia berubah (*laggards*).
5. Moral ekonomi yang dibedakan dalam moral subsistensi dan moral rasionalitas.

D. Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengumpul dan Pengolah Ikan Sebagai Pelaku Utama Dalam Menerima Manfaat.

A. Nelayan

Menurut UU RI nomor 45 Tahun 2009, terdapat beberapa definisi Nelayan yaitu :

- a. Nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan. Nelayan secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) yaitu nelayan dan nelayan kecil.
- b. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
- c. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).

Definisi lain menyatakan bahwa Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan kegiatan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya, termasuk ahli mesin dan juru masak yang

bekerja di atas kapal perikanan/kapal penangkap ikan. Adapun klasifikasi Nelayan terdiri dari :

- a. Nelayan penuh yaitu nelayan yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan.
- b. Nelayan sambilan utama yaitu nelayan yang sebagian besar waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan. Disamping melakukan pekerjaan penangkapan, nelayan kategori ini dapat pula mempunyai pekerjaan lain.
- c. Nelayan sambilan tambahan yaitu nelayan yang sebagian kecil waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan penangkapan ikan.

Para Nelayan membentuk kelembagaan pelaku utama, yaitu yang disebut dengan Kelompok Usaha Bersama (KUB). Kelompok Usaha Bersama, yang selanjutnya disebut KUB adalah badan usaha non badan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota. Disamping pengertian diatas, menurut Undang Undang Pelayaran, orang yang bekerja di kapal, termasuk di kapal perikanan disebut Awak Kapal yang terdiri dari Nakhoda dan Anak Buah Kapal. Dan Anak Buah Kapal terdiri dari tingkatan perwira dan non perwira, baik bagian navigasi dan bagian mesin serta bagian lain sesuai jenis dan fungsi serta besar kapalnya.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.

- a. Awak kapal adalah orang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal dan pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil.

- b. Nakhoda kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum di atas kapal serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Pemimpin kapal adalah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum di atas kapal untuk jenis dan ukuran tertentu serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu, berbeda yang dimiliki oleh Nakhoda.
- d. Anak buah kapal adalah awak kapal selain Nakhoda atau pemimpin kapal.

B. Pembudidaya Ikan

Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan. Sedangkan Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan PERMEN KP RI Nomor PER.05/MEN/2009 Tentang skala usaha di bidang pembudidayaan ikan, para pembudidaya ikan terdiri dari empat berdasarkan skala usahanya, yaitu :

1. Pembudidaya Ikan pada Usaha Pembudidaya Ikan skala Mikro, terdiri dari :

a. Usaha Pembenihan :

- Air Tawar.
- Air Payau/Laut.

b. Usaha Pembesaran :

- Air Tawar (KAD, KAT, Karamba, KJA, Mina Padi).
- Air Payau (Udang, Bandeng, Policulture).
- Laut (Rumput Laut, Abalone, Keekerangan, Ikan Bersirip).

2. Pembudidaya Ikan pada Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil, terdiri dari

a. Usaha Pembenihan :

- Air Tawar.

- Air Payau/Laut.
 - b. Usaha Pembesaran :
 - Air Tawar (KAD, KAT, Karamba, KJA, Mina Padi).
 - Air Payau (Udang, Bandeng, Policulture).
 - Laut (Rumput Laut, Abalon, kekerangan, Ikan bersirip).
3. Pembudidaya Ikan pada Usaha Pembudidayaan Ikan Skala Menengah.
- a. Usaha Pembenihan :
 - Air Tawar.
 - Air Payau/Laut.
 - b. Usaha Pembesaran :
 - Air Tawar (KAD, KAT, Karamba, KJA, Mina Padi).
 - Air Payau (Udang, Bandeng, Policulture).
 - Laut (Rumput Laut, Abalone, Kekerangan, Ikan bersirip).
4. Pembudidaya Ikan pada Usaha Pembudidayaan Ikan skala Besar.
- a. Usaha Pembenihan :
 - Air Tawar.
 - Air Payau/Laut.
 - b. Usaha Pembesaran :
 - Air Tawar (KAD, KAT, Karamba, KJA, Mina Padi).
 - Air Payau (Udang, Bandeng, Policulture).
 - Laut (Rumput Laut, Abalone, Kekerangan, Ikan bersirip).

Catatan: KAD: Kolam Air Deras, KAT: Kolam Air Tenang, KJA: Karamba Jaring Apung.

Penggolongan Skala usaha pada pembudidayaan ikan pada Permen KP RI Nomor PER. 05/MEN/2009. Berdasarkan parameter : Aset (Modal, volume/Luas unit Usaha), Omset (Hasil penjualan/thn), Jumlah tenaga kerja, Penerapan Teknologi, dan Status Hukum dan Perizinan.

Kelembagaan pelaku utama pada Pembudidaya Ikan yang dibentuk oleh para pembudidaya ikan disebut Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan). Kelompok Pembudidaya Ikan, yang selanjutnya disebut POKDAKAN adalah kumpulan pembudidayaan ikan yang terorganisir.

C. Pedagang/Pemasar Ikan dan Pengolah Ikan.

Hasil tangkapan ikan dan hasil pembudidayaan ikan yang diperoleh/dihasilkan oleh Nelayan dan pembudidaya ikan akan dibeli oleh :

A/ Para Pedagang (Pemasar) Ikan, yang terdiri dari:

1. Pedagang Pengumpul Lokal.
2. Pedagang Eceran.
3. Pedagang Besar.
4. Pedagang Ekspor.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor KEP.14/MEN/2012

Menyatakan bahwa Pemasar Hasil Perikanan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan pemasaran ikan dan produk ikan.

B/ Para Pengolah Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha pengolahan hasil perikanan, yang ditetapkan dalam PERMEN KP No 18/MEN/2006

1. Pengolah Ikan pada Usaha Pengolahan Hasil Perikanan skala Mikro.
2. Pengolah Ikan pada Usaha Pengolahan Hasil Perikanan skala Kecil.
3. Pengolah Ikan pada Usaha Pengolahan Hasil Perikanan skala Menengah.
4. Pengolah Ikan pada Usaha Pengolahan Hasil Perikanan skala Besar.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor Kep.14/Men/2012

Menyatakan bahwa Pengolah Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan usaha pengolahan ikan. Kemudian Kelompok Pengolah Pemasar, yang selanjutnya disebut POKLAHSAR adalah kelompok pengolah dan/atau pemasar hasil perikanan yang melakukan kegiatan ekonomi bersama dalam wadah kelompok.

Para pengolah ikan akan membeli ikan sebagai bahan baku, baik langsung dari nelayan maupun pembudidaya ikan maupun para pedagang tersebut diatas. Adapun perbedaan skala usaha pengolahan hasil perikanan tersebut diatas didasarkan parameter-parameter: omset, aset, jumlah tenaga kerja, status hukum dan perizinan, penerapan teknologi, dan sistem manajemen teknis.

BAB VII. KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERIKANAN

Menurut PPRI Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan bahwa kelembagaan penyuluhan perikanan terdiri atas :

1. Pemerintah; kelembagaan penyuluhan Pemerintah merupakan badan yang menangani penyuluhan di bidang perikanan yang merupakan kelembagaan penyuluhan Pemerintah pada tingkat pusat.
2. Pemerintah Daerah; Kelembagaan penyuluhan Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - a/ Pada tingkat provinsi, berupa Badan Koordinasi Penyuluhan Perikanan;
 - b/ Pada tingkat kabupaten/kota, berupa badan pelaksana Penyuluhan Perikanan yang merupakan fungsi pelaksanaan Penyuluhan Perikanan Pemerintah pada tingkat kabupaten/kota yang diintegrasikan pada satuan kerja perangkat daerah yang menangani fungsi perikanan;
 - c/ Pada tingkat kecamatan, berupa Balai Penyuluhan ; dan
 - d/ Pada kawasan potensial perikanan, berupa pos penyuluhan perikanan.
3. Kelembagaan penyuluhan swasta terdiri dari:
 - a/ asosiasi perikanan;

b/ korporasi perikanan;

c/ kelembagaan lainnya yang dibentuk oleh Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Utama.

4. Kelembagaan penyuluhan swadaya terdiri dari:

a/ kelompok perikanan; atau

b/ gabungan kelompok perikanan.

SEPENGGAL GURATAN PENUTUP

Sebelum era Jokowi berjaya, mungkin rumpun keilmuan penyuluhan khususnya penyuluhan perikanan masih awam tergaung di kalangan masyarakat umum, namun saat ini penyuluhan perikanan mulai dikenal sembari bidang kemaritiman yang menjadi program prioritas pemerintah. Hal ini juga tidak terlepas dari andil srikandi Indonesia nan tangguh Susi Pudjiastuti, kartini yang menempati posisi terpenting sebagai menteri kelautan dan perikanan negara zamrud khatulistiwa ini. Penulis terbersit untuk menuangkan buah pemikiran yang berkaitan erat dengan penyuluhan secara umum khususnya penyuluhan perikanan dengan harapan para pembaca dapat mengenal lebih mendalam bidang penyuluhan perikanan mulai dari sejarah perkembangan kelembagaan perikanan, falsafah dan pengertian penyuluhan perikanan, tujuan dan prinsip penyuluhan, asas dan pendekatan penyuluhan, tugas dan peran penyuluh, dan penerima manfaat penyuluhan perikanan.

Indonesia sebagai poros maritim dunia yang menjadi asa kita bersama sebagai bangsa Indonesia tidak mustahil untuk digapai, dengan diiringi pembangunan sarana dan prasarana kemaritiman dari sabang sampai merauke juga harus dibarengi dengan *human development* sektor kelautan dan perikanan melalui penyuluhan perikanan. Sumber daya manusia pada sektor tersebut harus mumpuni supaya dapat mengikuti perkembangan era globalisasi bahkan menyongsong revolusi industri 4.0.

Penyuluhan perikanan memiliki andil yang sangat besar terhadap pembangunan kelautan dan perikanan mengingat penyuluh sebagai agen perubahan tersebar di seluruh pelosok Indonesia dengan membawa misi yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha perikanan, pembudidaya ikan, dan nelayan sehingga dapat menopang kemajuan maritim Indonesia. Merebaknya era jaringan internet, menuntut para penyuluh perikanan untuk menjadi penyuluh zaman “now” sehingga dapat memperkaya informasi seluas luasnya terkait perikanan dan kelautan. *Cyber extension* tersebut otomatis dapat meningkatkan kapasitas penyuluh yang artinya dapat memperluas wawasan penyuluh untuk

mengkreasikan materi penyuluhan yang akan dikomunikasikan kepada sasaran dengan tetap mempertimbangkan kondisi struktur sosial setempat.

Penyuluhan perikanan merupakan pondasi keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan, karena mengelola *human resources* yang dapat mengubah nasibnya sendiri bukan sesuatu yang mudah seperti membalikkan telapak tangan. Hal tersebut membutuhkan jangka waktu yang lama, berkelanjutan, dan berkesinambungan hingga sasaran penyuluhan dapat mandiri atau melepas diri dari ketergantungan dengan penyuluh.

Semburat cahaya “suluh” atau obor yang diberikan sang agen perubahan memberikan dampak yang luar biasa terhadap perubahan perilaku sasaran baik aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Perubahan ketiga aspek tersebut merupakan tujuan utama penyuluhan perikanan yang menjadi indikator keberhasilan penyuluhan. Peran penyuluh sebagai “guru” dan sasaran sebagai “murid” yang terlibat dalam penyuluhan melalui kegiatan pembelajaran dua arah dalam mencapai tujuan bersama.

Keberhasilan penyuluhan pertanian dibuktikan dengan tercapainya swasembada beras pada era kepemimpinan Soeharto. Tidak mustahil swasembada perikanan juga dapat tercapai dimasa yang akan datang, peningkatan produksi perikanan domestik baik perikanan tangkap maupun budidaya dapat melepas ketergantungan produk impor, bahkan produksi garam juga diharapkan dapat berswasembada karena ketergantungan dengan garam impor sangat kuat sehingga merugikan petani garam yang pada akhirnya harga jual garam produksi mereka dihargai sangat rendah.

Selamat membaca....

Bagi para pembaca sekalian, penulis mengharapkan dengan kehadiran buku ini dapat memberikan pencerahan mengenai bidang penyuluhan perikanan, sehingga kita bersama pada akhirnya dapat membangun sektor perikanan dan kelautan. Membangun manusia dengan cara mem “wong” kan manusia itu sendiri sehingga tujuan bersama dapat tercapai.

-Pemimpi Kecil-

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang No.16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan
- Undang-undang RI No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang 31 tahun 2004 tentang perikanan
- Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1950 tentang pembubaran delegasi Republik Indonesia Serikat, Deputasi Indonesia dan Deputasi Indonesia Serikat
- Peraturan Presiden No.47 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi kementerian negara
- Keputusan Presiden No. 108 Th 1957 tentang susunan organisasi Kementerian Pertanian
- Keputusan Presiden Nomor 94 tahun 1962 tentang Susunan dan Regrouping Kabinet Kerja
- Keputusan Presiden No. 184 Tahun 1968 tentang perubahan atau penambahan struktur organisasi Departemen Pertanian
- Keputusan Presiden No. 136 tahun 1999 tentang kedudukan, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Departemen
- Keputusan Presiden No.141 tahun 1999 tentang sekretariat presiden
- Keputusan Presiden No.147 tahun 1999 perubahan atas No.136 tahun 1999 tentang susunan kabinet
- Keputusan Presiden No.165 Tahun 2000 tentang penugasan wapres melaksanakan tugas presiden
- Keputusan Presiden No.335/M tahun 1999 tentang susunan kabinet
- Keputusan No.44/Men/2002 tentang pedoman umum penyelenggaraan penyuluhan perikanan
- Per 18/Men/2006 tentang skala usaha pengolahan hasil perikanan
- Per/19/MPAN/10/2008 tentang penyuluh perikanan
- Per.05/Men/2009 tentang skala usaha dibidang pembudidayaan ikan
- Permen KP Per.13/MEN/2011 tentang pedoman penyelenggaraan program penyuluhan
- Per 14/Men/2012 tentang penumbuhan kelembagaan pelaku utama perikanan
- Peraturan pemerintah No.51 tahun 2002 tentang perkapalan

PPRI No.62 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penyuluhan

Ensminger, M.E.1962. Animal Science.Animal Agriculture Series.5th Edit Printers & Publishers, Inc.Danville, Illinois

Harrow, A. (1972) *A taxonomy of psychomotor domain -- a guide for developing behavioral objectives*. New York: David McKay

Kelsey, L.D and CC Hearne.1955.Cooperative Extension Work, Comstock Publising Associates, Ithaca.

Krathwohl, D. R., Bloom, B. S., & Bertram, B. M. (1973). *Taxonomy of Educational Objectives, the Classification of Educational Goals. Handbook II: Affective Domain*. New York: David McKay Co., Inc.

Maunder AH. (1972). *Agricultural extension: a reference manual*. Roma: FAO,UN.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pedesaan (P3P).Universitas Mataram.2007. Kinerja Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Lombok Timur.Pusat Penelitian dan Pengembangan Pedesaan. Mataram

Rukminto, A.2012.Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

Simpson E. J. (1972). *The Classification of Educational Objectives in the Psychomotor Domain*. Washington, DC: Gryphon House

Soelaeman, Munandar.1988. Ilmu Budaya Dasar. Suatu Pengantar.Bandung : PT Eresco

Soetomo.2006.Pembangunan Masyarakat.Yogyakarta: Pustaka Pelajat

Vardiansyah, D.2005. Filsafat Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT Indeks

Wiriatmadja, Soekandar. Pokok-pokok Penyuluhan Pertanian.Jakarta:CV.Yosaguna

PROFIL PENULIS PERTAMA

Dr. Wahyono Hadi Purnomo M.Fr, M.Ed lahir di Cilacap pada tanggal 18 Oktober 1950. Lulus dari Akademi Usaha Perikanan pada tahun 1973, pendidikan sarjana (S1) diselesaikan di Grimsby College of Technology, England pada tahun 1976. Pendidikan master (S2) di Sam Houston State University, USA selesai pada tahun 1985. Pendidikan doctor (Ph.D) dari university of The Philippines at Los Banos , Filipina tahun 1989. Beliau



pernah mengabdikan diri sebagai dosen di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta bidang keahlian teknologi penangkapan, penyuluhan perikanan dan manajemen

PROFIL PENULIS KEDUA

Dra. Ani Leilani, M.Si lahir di Bogor pada tanggal 17 Desember 1964. Penulis merupakan anak dari H.Mohamad Saleh dan Hj.Enny Saeni. Suami penulis bernama Dr. OD. Soebhakti Hasan dan dikaruniai tiga anak yang bernama Yusi Yolanda Bhakti, Yoga Hasya Bhakti dan Yudha Fatiya Bhakti. Penulis lulus pendidikan pada Program Diploma D3 Politeknik IPB pada tahun 1986 kemudian lulus jenjang sarjana S1 pada Fakultas Pendidikan Biologi Universitas Pakuan Bogor tahun 1993 dan lulus jenjang Magister Program Studi Penyuluhan Pembangunan IPB tahun 2006. Penulis saat ini menjabat sebagai Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta.



PROFIL PENULIS KETIGA

Penulis bernama lengkap Nia Nurfitriana, S.Pi, M.Si yang dilahirkan di Kota Palembang pada tanggal 17 Mei 1985. Penulis merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara dengan orang tua yang bernama dr. Aliumi Prawira Kusuma dan Ir. Sri Dewi Titisari, M.Si. Penulis mulai menempuh karirnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Direktorat Pemasaran Dalam Negeri, Ditjen P2HP mulai Maret 2008-Oktober 2016, Oktober 2016-Mei 2017 pada Pusat Riset Perikanan, kemudian Mei 2017 hingga saat ini di Pusat Pendidikan Kelautan dan



Perikanan. Demi menggapai *passion* yang selama ini penulis harapkan, penulis menjadi pengajar luar pada Laboratorium Penyuluhan di Sekolah Tinggi Perikanan Jurusan Penyuluhan Cikaret, Bogor.

Penulis merupakan alumni dari Institut Pertanian Bogor (IPB) angkatan 40 dengan mengambil jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan selama 3 tahun 8 bulan pada tahun 2003-2007. Setelah itu, penulis meneruskan jenjang pendidikan pada tahap Magister di Institut Pertanian Bogor, Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB selama 2 tahun 9 bulan melalui beasiswa Pusat Pendidikan, KKP pada tahun 2013-2016. Selama menempuh pendidikan sarjana penulis juga aktif menjadi asisten dosen di Laboratorium Biologi Laut dan menjadi aktivis pada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IPB.



AMaFRaD PRESS

ISBN 978-623-7651-32-1



9 786237 651321

ISBN 978-623-7651-33-8 (PDF)



9 786237 651338

AMAFRAD Press

Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Gedung Mina Bahari III, Lantai 6
Jl. Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3513300 Fax: 3513287
Email : amafradpress@gmail.com
Nomor IKAPI: 501/DKI/2014